



LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA DINAS
TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025

DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2024



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan RKPD Tahun 2025 yang bersifat indikatif.

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dinas pendidikan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - f. badan penanggulangan bencana daerah;
 - g. dinas sosial;
 - h. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
 - i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. dinas ketahanan pangan;
 - k. dinas lingkungan hidup;
 - l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. dinas perhubungan;
 - n. dinas komunikasi dan informatika;
 - o. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - q. dinas pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - r. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - s. dinas pertanian;
 - t. sekretariat daerah;
 - u. sekretariat dprd;
 - v. badan perencanaan pembangunan daerah;
 - w. badan keuangan daerah;
 - x. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - y. inspektorat;
 - z. kecamatan payakumbuh utara;
 - aa. kecamatan payakumbuh barat;
 - bb. kecamatan payakumbuh timur;
 - cc. kecamatan payakumbuh selatan;
 - dd. kecamatan lamposi tigo nagori; dan
 - ee. kantor kesbangpol.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila dalam pelaksanaan RKPD mengalami perubahan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



SUPRAYITNO

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR 13

KATA PENGANTAR

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 antara lain :

- a. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas;
- b. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- d. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- e. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya.

Tujuan 2 dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 Kota Payakumbuh menjadi bagian dari tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk mewujudkannya.

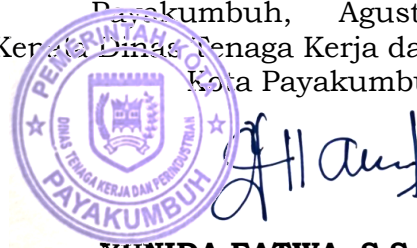
Langkah awal dari upaya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai urusan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian sudah dapat dirumuskan dalam bentuk Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 dan dijabarkan pada Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahunnya. Renja Tahun 2025 ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan strategis pembangunan ekonomi masyarakat melalui ketenagakerjaan dan perberdayaan IKM.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, proses dan tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini sudah dapat di rampungkan. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Petunjuk Pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa penyusunan dokumen Rencana Kerja ini merupakan bagian dari Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Semoga dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat memberi manfaat bagi segenap Stakeholders terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan dan tugas pokok kedinasan.

Dan ucapan terimakasih terhadap semua pihak serta tim perumus dan penyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini, dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam mewujudkan capaian Tujuan, Sasaran dan Program Pelaksanaan Pembangunan untuk masa lima tahun kedepan. Terima Kasih.

Payakumbuh, Agustus 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh



YUNIDA FATWA, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670601 198809 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	53
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	64
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	70
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	84
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	90
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	90
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	95
3.3 Program dan Kegiatan	96
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	114
BAB V PENUTUP	137
LAMPIRAN	140

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Keraj (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 Kota Payakumbuh	33
Tabel II.2	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	63
Tabel II.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Payakumbuh	72
Tabel II.4a.1	Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Tahun 2024 dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Per Kecamatan	86
Tabel II.4a.2	Persandingan Daftar Kegiatan Dan E - Pokir Tahun 2024 dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Per Kecamatan	88
Tabel II.4b	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025	89
Tabel III.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiran Maju Tahun 2026 Kota Payakumbuh	97
Tabel IV.1	Pemerintah Kota Payakumbuh Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025	115
Tabel IV. 2	Usulan Program/Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2025	134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode Tahun 2023-2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh disusun sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang secara eksplisit menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas, sehingga target kinerja yang telah direncanakan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat tercapai dengan baik. Rencana Kerja juga diharapkan sebagai koreksi apabila terjadi perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu untuk ditindak lanjuti sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Rencana Kerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan target kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja untuk mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target dan analisis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan mencantumkan program dan kegiatan yang terperinci untuk jangka pendek sebagai penerjemahan dari sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, namun juga meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang dibutuhkan secara optimal.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah melalui beberapa proses persiapan dan tahapan, diantaranya sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
3. Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada Tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025. Proses penyusunan Renja mengacu pada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2023-2026 sesuai dengan hasil Musrenbang RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2025, hibah dan pikir serta prioritas lainnya dalam pencapaian kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2016;

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024;
23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah :

1. Untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPD Kota Payakumbuh di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan;

2. Untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk 1 (satu) tahun mendatang.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2025;
2. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja dan urusan Perindustrian serta laporan kinerja;
3. Terdapat informasi-informasi yang memudahkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pada akhirnya dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dimaksud untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai.

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Untuk Tahun 2023 seluruh program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1) Program Hubungan Industrial

Program ini dilaksanakan dengan target persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 4,03% dan terealisasi sebesar 4,03% dengan capaian 100%. Yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini berupa pencegahan perselisihan hubungan industrial dengan target sebanyak 7 perkara dan terealisasi sebanyak 7 perkara dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.538.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.638.500,- atau 83,43%.

- b) Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini berupa penyelesaian kasus perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja yang melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Bidang Tenaga Kerja) dengan target sebanyak 3 perkara dan terealisasi sebanyak 4 perkara dengan capaian 133,33% Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.079.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.330.150,- atau 81,64%.

Realisasi capaian fisik sub kegiatan ini melebihi 100% karena target awal hanya 3 perkara namun sampai akhir tahun perkara yang masuk sebanyak 4 perkara dan semua dapat diselesaikan.

3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan dengan target Nilai IKM sebesar 90 dan terealisasi sebesar 98,84 dengan capaian 109,82% yang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen Renja, Perubahan Renja, DPA SKPD dan Perubahan DPA SKPD dengan target sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.917.040,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.423.620,- atau 97,25%

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan ini berupa penyusunan laporan (LAKIP, LPPD dan LKPJ) serta pelaksanaan rapat koordinasi dengan target sebanyak 3 laporan dan terealisasi sebanyak 3 laporan dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.998.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.894.190,- atau 93,86%.

c) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini berupa penyusunan laporan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 11 laporan dan terealisasi sebanyak 11 laporan dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.106.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 87.883.900,- atau 97,53%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini berupa pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 21 orang dan terealisasi sebanyak 21 orang dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.436.371.905,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.975.008.695,- atau 81,06%.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan ini berupa dokumen pembayaran honor pengelola administrasi keuangan pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, PPTK, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 176.851.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 173.551.200,- atau 98,13%.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sub Kegiatan ini berupa pengadaan pakaian dinas beserta atribut lengkap dengan target sebanyak 21 stel dan terealisasi sebanyak 21 stel dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.600.000,- atau 100%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Baterai, bola lampu, isolasi listrik, kabel, lampu philips, stop kontak) pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 6 jenis dan terealisasi sebanyak 6 jenis dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

1.998.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.993.900,- atau 99,79%.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan peralatan rumah tangga (tabung apar) dengan target sebanyak 10 buah dan terealisasi sebanyak 10 buah dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.882.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.382.000,- atau 86,76%.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor dengan target sebanyak 63 jenis dan terealisasi sebanyak 63 jenis dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.651.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.854.420,- atau 97,56%.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan cetakan, biaya penggandaan, penjilidan dan spanduk dengan target cetakan sebanyak 17 buku, biaya penggandaan sebanyak 51.442 lembar, penjilidan sebanyak 31 buku dan spanduk sebanyak 60 meter dan terealisasi cetakan sebanyak 17 buku, biaya penggandaan sebanyak 51.442 lembar, penjilidan sebanyak 31 buku dan spanduk sebanyak 60 meter dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.193.180,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.896.275,- atau 98,66%.

e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub kegiatan ini berupa penyediaan surat kabar yaitu Padang Ekspres dan Haluan dengan target sebanyak 1.016 eksemplar dan terealisasi sebanyak 1.016 eksemplar dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.004.560,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.580.000 ,- atau 92,93%.

- f) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sub kegiatan ini berupa laporan penyediaan makanan dan minuman tamu dengan target sebanyak 10 laporan dan terealisasi sebanyak 10 laporan dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.478.750,- atau 99,80%.
 - g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub kegiatan ini berupa laporan penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat dengan target sebanyak 25 laporan dan terealisasi 25 laporan dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 182.340.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 182.279.054,- atau 99,97%.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub kegiatan ini berupa pengadaan peralatan dan mesin lainnya (laptop 1 unit, PC 1 unit, printer 3 unit) dengan target sebanyak 5 unit dan terealisasi sebanyak 5 unit dengan capaian 100 %. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.851.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.546.000,- atau 93,91%.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub kegiatan ini berupa laporan penyediaan benda pos berupa materai dengan target sebanyak 1 jenis dan terealisasi sebanyak 1 jenis dengan capaian 100 %. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

2.205.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau 99,77%.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini berupa laporan penyediaan jasa komunikasi dan listrik dengan target sebanyak 2 rekening dan terealisasi sebanyak 2 rekening dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 169.947.468,- dan terealisasi sebesar Rp. 148.240.616,- atau 87,23%.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini Kantor berupa laporan penyediaan Honor TJP kebersihan, TJP sopir dan TJP Pramubakti dengan target sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 1 laporan dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 117.250.488,- dan terealisasi sebesar Rp. 116.229.727,- atau 99,13%.

g Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini berupa pembayaran pajak kendaraan dinas, pemeliharaan (penggantian suku cabang, service, oli/pelumas) dan BBM dengan target sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.190.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.110.042,- atau 99,80%.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini berupa pembayaran pajak kendaraan dinas, pemeliharaan (penggantian suku cabang, service,

oli/pelumas) dan BBM pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 12 unit (1 unit roda 4 dan 11 unit roda 2) dan terealisasi sebanyak 12 unit (1 unit roda 4 dan 11 unit roda 2) dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.714.671,- atau 95,48%.

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan meja kerja dan lemari dengan target sebanyak 48 unit dan terealisasi sebanyak 48 unit dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.638.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.233.600,- atau 92,82%.

d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (Laptop, PC unit, printer, AC) dengan target sebanyak 9 unit dan terealisasi sebanyak 9 unit dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.970.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.654.900,- atau 94,72%.

2). Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang tersusun sebesar 0,80% dan terealisasi sebanyak 100% dengan capaian 12.500% Yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

Sub kegiatan ini berupa penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan

capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.345.976,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.208.471,- atau 92,39%.

- b) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
Sub kegiatan ini berupa pendampingan penyusunan dokumen perusahaan Rencana Tenaga Kerja Mikro dengan target sebanyak 1 perusahaan dan terealisasi sebanyak 1 perusahaan dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.647.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.714.700,- atau 83,48%.

3). Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dengan target sebesar 3,92% dan terealisasi sebesar 4,89% dengan capaian 124,74%.

Yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

- a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

Sub kegiatan ini berupa pelatihan membuat kue/roti dan pelatihan menjahit pengembangan busana dengan target sebanyak 80 orang dan terealisasi sebanyak 80 orang dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 440.189.118,- dan terealisasi sebesar Rp. 421.169.864,- atau 95,68%.

4) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan dengan target persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme

layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota sebesar 46,35% dan terealisasi sebesar 51,21% dengan capaian 110,49%.

Yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

Sub Kegiatan ini berupa pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dengan target sebanyak 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.447.880,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.097.640,- atau 98,72%.

b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

a) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Sub kegiatan ini berupa pelayanan bagi pencari dan pemberi kerja yang terdaftar pada pasar kerja melalui sistem online dan pembayaran honor Tenaga Jasa Perorangan dengan target sebanyak 250 orang dan terealisasi sebanyak 289 orang dengan capaian 116%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.548.146,- dan terealisasi sebesar Rp. 78.229.042,- atau 91,44%.

Realisasi fisik yang melebihi 100% disebabkan karena meningkatnya jumlah pencari kerja yang membuat AK1 dan dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah lapangan kerja baru dan mewajibkan pelamar untuk memenuhi AK1.

5) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini dilaksanakan dengan target dan realisasi sebagai berikut :

1. Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna sebesar 0,10% dan terealisasi sebesar 0,5% dengan capaian 500%.
2. Persentase sentra/klaster industri yang tertata sebesar 20% dan terealisasi sebesar 50% dengan capaian 2.500%.

Yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini berupa penyusunan dokumen RPIK Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 174.593.340,- dan terealisasi sebesar Rp. 132.186.300,- atau 75,71%.

b) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Sub kegiatan ini berupa kegiatan operasional Dekranasda dalam mengikuti agenda rutin Dekranasda Propinsi dan Pusat, pelatihan bambu dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 555.687.870,- dan terealisasi sebesar Rp. 539.061.201,- atau 97,01%.

c) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Sub kegiatan ini berupa kegiatan pelaksanaan pelatihan/workshop penguatan peralatan produksi bagi IKM melalui Teknologi Tepat Guna, dalam mengembangkan kreatifitas, menciptakan inovasi

pembuatan produk-produk TTG yang dapat bernilai guna bagi usaha lain, untuk Tahun 2023 TTG yang dicoba dibuat adalah mesin pembelah bambu dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100% . Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.108.120,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.031.528,- atau 96,54%.

d) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Sub Kegiatan ini berupa kegiatan pembayaran belanja jasa kantor (honor tenaga keamanan, honor tenaga kebersihan, honor tenaga pramubakti, honor tenaga ahli operator mesin sentra rendang, JKK, JKM) Pengadaan Peralatan Operasional Sentra IKM Rendang, pembelian tabung gas, penyediaan sarana prasarana kegiatan produksi sentra rendang, penyediaan sarana prasarana kegiatan administrasi kantor, kebersihan kantor, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga (alat pembersih, alat pendingin, alat dapur, alat komputer), dll dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 507.653.731,- dan terealisasi sebesar Rp. 497.026.542,- atau 97,91%.

e) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Sub Kegiatan ini berupa kegiatan pembayaran honorarium TJP di Mall Pelayanan Publik dan TJP Tenun Balai Panjang serta pelaksanaan Workshop batik cap dengan target sebanyak 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian

100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 142.053.558,- dan terealisasi sebesar Rp. 140.956.733,- atau 99,23%.

- 6) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk sebesar 2,40% dan terealisasi sebesar 9,33% dengan capaian 388,75%.

Yang dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penertiban Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sub kegiatan ini berupa kegiatan fasilitasi Sertifikat Halal untuk IKM Industri Pangan dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 357.838.40,- dan terealisasi sebesar Rp. 295.576.779,- atau 82,60%.

Dari uraian diatas terlihat bahwa capaian Kinerja semua urusan terlaksana dengan baik, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2023 menunjukkan bahwa sasaran yang diinginkan pada Tahun 2023 telah memenuhi target. Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian Kegiatan/Program/Sasaran Strategis Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.873.597.770,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.201.983.010,- atau 88,57%.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain :
 - Kurangnya analisis dalam menentukan target kinerja yang direncanakan, sehingga tidak dapat teralisasi;
 - Pagu anggaran yang terbatas, sehingga kegiatan tidak dapat sepenuhnya terlaksana dengan baik.
- b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan antara lain :
 - Adanya kerjasama dengan semua pihak dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai kewenangan.
- c. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan antara lain :
 - Adanya respon dan antusiasme dari pelaku usaha/IKM dan dukungan dari stakeholder dengan semua pihak dalam rangka memfasilitasi pengurusan sertikat halal untuk produk IKM, sehingga pencapaian target kinerja melebihi dari target yang ditetapkan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sebagai berikut :

Tahun 2023 realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.
- b. Terhadap realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sebagai berikut :

Tahun 2023 realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, semua melebihi target.

c. Terhadap realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sebagai berikut :

1. Target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra dengan Nilai 93. Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, realisasi nilai 98,84 dengan kegiatan :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 80%, realisasi 100%, dengan sub kegiatan :

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen Renja, Perubahan Renja, DPA SKPD dan Perubahan DPA SKPD dengan target sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen dengan capaian 100%.

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sub kegiatan ini berupa penyusunan laporan (LAKIP, LPPD dan LKPJ) serta pelaksanaan rapat koordinasi dengan target sebanyak 3 laporan dan terealisasi sebanyak 3 laporan dengan capaian 100%.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 80%, realisasi 100%, dengan sub kegiatan :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini berupa pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target

sebanyak 21 orang dan terealisasi sebanyak 21 orang dengan capaian 100%.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan ini berupa dokumen pembayaran honor pengelola administrasi keuangan pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu, PPTK, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100%.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100%, realisasi 100%, dengan sub kegiatan :

a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sub Kegiatan ini berupa pengadaan pakaian dinas beserta atribut lengkap dengan target sebanyak 21 stel dan terealisasi sebanyak 21 stel dengan capaian 100%.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 80%, realisasi 100%, dengan sub kegiatan :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Baterai, bola lampu, isolasi listrik, kabel, lampu philips, stop kontak) pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 6 jenis dan terealisasi sebanyak 6 jenis dengan capaian 100%.

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sub Kegiatan ini berupa penyediaan peralatan rumah tangga (tabung apar) dengan target sebanyak 10 buah dan terealisasi sebanyak 10 buah dengan capaian 100%.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub Kegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor dengan target sebanyak 63 jenis dan terealisasi sebanyak 63 jenis dengan capaian 100%.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub Kegiatan ini berupa penyediaan cetakan, biaya penggandaan, penjilidan dan spanduk dengan target cetakan sebanyak 17 buku, biaya penggandaan sebanyak 51.442 lembar, penjilidan sebanyak 31 buku dan spanduk sebanyak 60 meter dan terealisasi cetakan sebanyak 17 buku, biaya penggandaan sebanyak 51.442 lembar, penjilidan sebanyak 31 buku dan spanduk sebanyak 60 meter dengan capaian 100%.
- e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sub kegiatan ini berupa penyediaan surat kabar yaitu Padang Ekspres dan Haluan dengan target sebanyak 1.016 eksemplar dan terealisasi sebanyak 1.016 eksemplar dengan capaian 100%.
- f) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
Sub kegiatan ini berupa laporan penyediaan makanan dan minuman tamu dengan target sebanyak 10 laporan dan terealisasi sebanyak 10 laporan dengan capaian 100%.
- g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub kegiatan ini berupa laporan penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi

Sumatera Barat dengan target sebanyak 25 laporan dan terealisasi 25 laporan dengan capaian 100%.

- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 80%, realisasi 100% dengan sub kegiatan yaitu :

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini berupa pengadaan peralatan dan mesin lainnya (laptop 1 unit, PC 1 unit, printer 3 unit) dengan target sebanyak 5 unit dan terealisasi sebanyak 5 unit dengan capaian 100%.

- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 80%, realisasi 100% dengan sub kegiatan yaitu :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan ini berupa laporan penyediaan benda pos berupa materai dengan target sebanyak 1 jenis dan terealisasi sebanyak 1 jenis dengan capaian 100%.

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini berupa laporan penyediaan jasa komunikasi dan listrik dengan target sebanyak 2 rekening dan terealisasi sebanyak 2 rekening dengan capaian 100%.

- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini Kantor berupa laporan penyediaan Honor TJP kebersihan, TJP sopir dan TJP Pramubakti dengan target sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 1 laporan dengan capaian 100%.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 80%, realisasi 100% dengan sub kegiatan yaitu :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini berupa pembayaran pajak kendaraan dinas, pemeliharaan (penggantian suku cabang, service, oli/pelumas) dan BBM dengan target sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit dengan capaian 100%.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini berupa pembayaran pajak kendaraan dinas, pemeliharaan (penggantian suku cabang, service, oli/pelumas) dan BBM pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 12 unit (1 unit roda 4 dan 11 unit roda 2) dan terealisasi sebanyak 12 unit (1 unit roda 4 dan 11 unit roda 2) dengan capaian 100%.

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan meja kerja dan lemari dengan target sebanyak 48 unit dan terealisasi sebanyak 48 unit dengan capaian 100%.

d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (Laptop, PC unit, printer, AC) dengan target sebanyak 9 unit dan terealisasi sebanyak 9 unit dengan capaian 100%.

2. Target kinerja Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan target program akhir Renstra 4,8%, terealisasi sebesar 100% dengan capaian 2.083% dengan kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan target sebesar 0,8%, realisasi sebesar 100% Dengan sub kegiatan :

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

Sub kegiatan ini berupa penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100%.

- b) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

Sub kegiatan ini berupa pendampingan penyusunan dokumen perusahaan Rencana Tenaga Kerja Mikro dengan target sebanyak 1 perusahaan dan terealisasi sebanyak 1 perusahaan dengan capaian 100%.

3. Target kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan target program akhir Renstra sebesar 4%, terealisasi sebesar 4,89% dengan capaian 122,25%, dengan kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan target sebesar 3,92%, realisasi sebesar 4,89% dengan sub kegiatan :

- a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

Sub kegiatan ini berupa pelatihan membuat kue/roti dan pelatihan menjahit pengembangan busana dengan target sebanyak 80 orang dan terealisasi sebanyak 80 orang dengan capaian 100%.

4. Target kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja dengan target program akhir Renstra sebesar 46,60%, terealisasi sebesar 51,21% dengan capaian 109,89% , dengan kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota sebesar 46,35% terealisasi sebesar 51,21% dengan capaian 100%, dengan sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
Sub Kegiatan ini berupa pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dengan target sebanyak 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang dengan capaian 100%.
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja sebesar 80%, terealisasi sebesar 80% dengan capaian 100%, dengan sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Sub kegiatan ini berupa pelayanan bagi pencari dan pemberi kerja yang terdaftar pada pasar kerja melalui sistem online dan pembayaran honor Tenaga Jasa Perorangan dengan target sebanyak 250 orang dan terealisasi sebanyak 289 orang dengan capaian 116%.
5. Target kinerja Program Hubungan Industrial dengan target program akhir Renstra sebesar 4,03%, terealisasi sebesar 4,03% dengan capaian 100%, dengan kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota sebesar 75% terealisasi sebesar 75% dengan capaian 100%, dengan sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan

yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini berupa pencegahan perselisihan hubungan industrial dengan target sebanyak 7 perkara dan terealisasi sebanyak 7 perkara dengan capaian 100%.

- b) Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini berupa penyelesaian kasus perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja yang melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Bidang Tenaga Kerja) dengan target sebanyak 3 perkara dan terealisasi sebanyak 4 perkara dengan capaian 133,33%.

6. Target kinerja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan target program akhir Renstra sebesar 0,10% dan 2% terealisasi sebesar 0,5% dan 50% dengan capaian 500% dan 2.500%, dengan kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebesar 66,67%, terealisasi sebesar 83,33%. dengan capaian 124,99%, dengan sub kegiatan :

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini berupa penyusunan dokumen RPIK Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100%.

- b) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Sub kegiatan ini berupa kegiatan operasional Dekranasda dalam mengikuti agenda rutin Dekranasda Propinsi dan Pusat, pelatihan bambu dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100%.

- c) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Sub kegiatan ini berupa kegiatan pelaksanaan pelatihan/workshop penguatan peralatan produksi bagi IKM melalui Teknologi Tepat Guna, dalam mengembangkan kreatifitas, menciptakan inovasi pembuatan produk-produk TTG yang dapat bernilai guna bagi usaha lain, untuk Tahun 2023 TTG yang dicoba dibuat adalah mesin pembelah bambu dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100% .

- d) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Sub Kegiatan ini berupa kegiatan pembayaran belanja jasa kantor (honor tenaga keamanan, honor tenaga kebersihan, honor tenaga pramubakti, honor tenaga ahli operator mesin sentra rendang, JKK, JKM) Pengadaan Peralatan Operasional Sentra IKM Rendang, pembelian tabung gas, penyediaan sarana prasarana kegiatan produksi sentra rendang, penyediaan sarana prasarana kegiatan administrasi kantor, kebersihan kantor, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga (alat pembersih, alat pendingin, alat dapur, alat komputer), dll dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100%.

- e) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Sub Kegiatan ini berupa kegiatan pembayaran honorarium TJP di Mall Pelayanan Publik dan TJP Tenun Balai Panjang serta pelaksanaan Workshop batik cap dengan target sebanyak 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100%.

7. Target kinerja Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dengan target akhir Renstra sebesar 2,70%, terealisasi sebesar 9,33% dengan capaian 388,75%, dengan kegiatan :

1. Kegiatan Penertiban Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 6 IKM, realisasi 6 IKM dengan sub kegiatan :

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan target sebanyak 6 IKM dan terealisasi sebanyak 6 IKM dengan capaian 100%.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

1) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

- a. Mengevaluasi kembali langkah-langkah dalam pencapaian target kinerja;
- b. Mengkoreksi dan melakukan perubahan terhadap hal yang menjadi tidak terpenuhinya target kinerja. Dari hasil evaluasi

- tersebut perlu diolah, dipelajari dan dikoreksi agar terpenuhinya target kinerja;
- c. Melakukan konsolidasi. Konsolidasi bisa dilakukan dengan pihak internal atau eksternal. Konsolidasi ini diperlukan untuk strategi dalam mencapai target kinerja;
 - d. Membuat perencanaan yang lebih efektif dan efisien. Perencanaan yang dibuat harus perencanaan yang matang serta dapat mengantisipasi akan kendala yang terjadi;
 - e. Melakukan inovasi dan percepatan koordinasi dan sinergisitas antar bidang urusan agar terjalin komunikasi yang baik sehingga permasalahan terhadap target kinerja yang tidak tercapai ada solusinya.
- 2) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :
- a. Menjalankan sistem perencanaan yang baik untuk program/kegiatan;
 - b. Pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai rencana yang ditargetkan.
- 3) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :
- a. Meningkatkan disiplin kinerja yang baik dari seluruh staf dinas dalam melaksanakan program/kegiatan;
 - b. Merencanakan target kinerja dengan memprediksi kondisi yang akan terjadi tahun selanjutnya.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini diasajikan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel II.1.

Tabel II.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA (RENJA) PD
TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Triwulan : I, II, III,IV

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	1.02		TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN			18,036,079,544		4,507,201,524		5,873,597,770		872,389,899		1,294,584,616		1,224,602,230		1,810,406,265		5,201,983,010		1,636,358,226		9.07	Disnakerperin
	A		BIDANG SEKRETARIAT			14,099,076,260		3,099,486,389		3,463,866,791		648,303,732		961,565,397		641,499,200		711,387,231		2,962,755,560		1,253,776,475		8.89	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	I	PROGRAM :	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	93	14,099,076,260	91,27	3,099,486,389	90	3,463,866,791		648,303,732		961,565,397		641,499,200		711,387,231		2,962,755,560		1,253,776,475		8.89	

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
				Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektoral	A		A		A																
	1	KEGIATAN :	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/ kegiatan	80%	381,473,442	80%	99,270,490	80%	126,021,990		34,653,940		26,731,780		35,971,240		24,844,750		122,201,710		48,166,440		12.63	
	1	SUB KEGIATAN :	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		151,338,700	4 dokumen	46,617,230	4 dokumen	17,917,040	1	6,834,590	1	4,492,280	1	1,188,000	1	4,908,750	4	17,423,620	1	7,456,090		4.93	
	2	SUB KEGIATAN :	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		148,215,360	- 4 dokumen - 7 kali	52,653,260	3 laporan	17,998,950	1	7,474,450		2,779,500	1	5,831,240	1	809,000	3	16,894,190	1	7,474,450		5.04	

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	3	SUB KEGIATAN :	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		81,919,382			11 laporan	90,106,000	2	20,344,900	3	19,460,000	3	28,952,000	3	19,127,000	11	87,883,900	4	33,235,900		40.57	
	2	KEGIATAN :	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	80%	10,652,106,242	80%	2,243,928,282	80%	2,613,223,105		437,782,951		731,672,529		469,264,136		509,840,279		2,148,559,895		892,386,507		8.38	
	4	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		5,072,431,544	39 orang	2,243,928,282	21 orang	2,436,371,905	21	408,307,751	21	687,459,729	21	425,675,336	21	453,565,879.00	21	1,975,008,695	21	833,436,107		16.43	
	5	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		5,579,674,698			1 dokumen	176,851,200		29,475,200		44,212,800		43,588,800	1	56,274,400.00	1	173,551,200		58,950,400		1.06	
	3	KEGIATAN :	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berpakai an Dinas Dengan Atribut Lengkap	100%	45,000,000	100%	9,880,000	100%	12,600,000		0		12,600,000		0		0		12,600,000		12,600,000		28.00	

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	6	SUB KEGIATAN :	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		45,000,000	19 set	9,880,000	21 paket	12,600,000			21	12,600,000					21	12,600,000	21	12,600,000		28.00	
	4	KEGIATAN :	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional Kantor	80%	956,533,960	80%	403,540,129	80%	274,569,140		66,174,804		101,400,040		38,103,150		64,786,405		270,464,399		138,765,848		14.51	
	7	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan		16,000,000	7 jenis	4,003,300	6 paket	1,998,150	6	1,993,900							6	1,993,900	6	1,993,900		12.46	
	8	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli		45,000,000								-					-	-	-	-		-	
	9	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		25,000,000			10 paket	18,882,000	10	9,500,000		-				6,882,000	10	16,382,000	10	9,500,000		38.00	

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	10	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		161,533,960	86 jenis	48,704,060	63 paket	32,651,250	31	10,478,470	15	3,664,000	17	6,319,000		11,392,950	63	31,854,420	46	14,142,470		8.76	
	11	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		135,000,000	9 jenis	27,821,330	9 paket	22,193,180	7	10,212,200		5,423,425		2	6,260,650	9	21,896,275	7	12,320,625		9.13		
	12	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan		28,000,000	1016 koran	6,004,560	2 dokumen	6,004,560	2	960,000		900,000		3,270,000		450,000	2	5,580,000	2	1,860,000		6.64	
	13	SUB KEGIATAN :	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		46,000,000	780 porsi	13,387,900	10 laporan	10,500,000	1	1,720,000		-	2	2,791,250	7	5,967,500	10	10,478,750	1	1,720,000		3.74	
	14	SUB KEGIATAN :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		500,000,000	50 kali	303,618,979	25 laporan	182,340,000	10	31,310,234	5	91,412,615	10	25,722,900		33,833,305	25	182,279,054	15	97,228,853		19.45	

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	5	KEGIATAN :	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memakai barang milik daerah	100%	695,000,000		0	100%	37,851,000		30,662,000		0		0		4,884,000		35,546,000		30,662,000		4.41	
	15	SUB KEGIATAN :	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		85,000,000			3 unit	37,851,000	3	30,662,000		-			2	4,884,000	5	35,546,000	3	30,662,000		36.07	
	16	SUB KEGIATAN :	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli		425,000,000													-		-				
	17	SUB KEGIATAN :	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang dibeli		185,000,000													-		-				
	6	KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana penunjang operasional kantor	80%	918,339,408	80%	238,993,686	80%	289,402,956		56,357,822		63,899,457		67,452,386		78,960,678		266,670,343		96,900,812		10.55	
	18	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		8,000,000	57 lembar	570,000	1 laporan	2,205,000		100,000		500,000		500,000	1	1,100,000	1	2,200,000	-	600,000		7.50	

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	19	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		420,000,000	2 rekening	120,876,918	1 laporan	169,947,468		36,429,264		35,731,880		38,129,166	1	37,950,306	1	148,240,616	-	58,028,084		13.82	
	20	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		490,339,408	- 4 orang - 400 porsi	117,546,768	1 laporan	117,250,488		19,828,558		27,667,577		28,823,220	1	39,910,372	1	116,229,727	-	38,272,728		7.81	
	7	KEGIATAN :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan sarana prasarana kantor yang dibayarkan	80%	450,623,208	80%	103,873,802	80%	110,198,600		22,672,215		25,261,591		30,708,288		28,071,119		106,713,213		34,294,868		7.61	

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	21	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		156,760,000	1 unit	39,072,913	1 unit	39,190,000	1	8,272,346	1	5,730,000	1	12,307,696	1	12,800,000	1	39,110,042	1	9,772,346		6.23	
	22	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		237,600,000	12 unit	59,207,289	12 unit	59,400,000	12	11,794,969	12	19,531,591	12	10,116,992	12	15,271,119	12	56,714,671	12	21,917,622		9.22	
	23	SUB KEGIATAN :	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebel yang dipelihara		15,000,000	48 buah	5,593,600	48 unit	5,638,600				-	48	5,233,600			48	5,233,600	-	-		-	
	24	SUB KEGIATAN :	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		41,263,208			9 unit	5,970,000	4	2,604,900		-	5	3,050,000			9	5,654,900	4	2,604,900		6.31	
	B		BIDANG TENAGA KERJA			876,819,008		328,086,743		640,796,220		25,773,170		143,129,128		255,427,203		180,058,866		604,388,367		38,337,590		4.37	

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
Meningkatnya serapan Tenaga Kerja	II	PROGRAM :	PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	4,8%	8,000,000		0	0,8%	59,993,776		0		0		15,196,946		39,726,225		54,923,171		0		0	
	8	KEGIATAN :	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	4,8%	8,000,000		0	0,8%	59,993,776		0		0		15,196,946		39,726,225		54,923,171		0		0	
	25	SUB KEGIATAN :	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		4,000,000			1 dokumen	54,345,976				-		13,666,746	1	36,541,725	1	50,208,471		-			
	26	SUB KEGIATAN :	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK mikro		4,000,000			1 perusahaan	5,647,800				-		1,530,200	1	3,184,500	1	4,714,700		-			
	III	PROGRAM :	PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	4%	304,000,000	- 99 orang - 75 orang	193,582,881	3,92%	440,189,118	4,673,400	124,307,500	192,825,539	99,363,425	421,169,864	4,673,400	1.54								

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	9	KEGIATAN :	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80%	300,000,000	80%	193,582,881	80%	440,189,118		4,673,400		124,307,500		192,825,539		99,363,425		421,169,864		4,673,400		1.56	
	27	SUB KEGIATAN :	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun n		296,000,000	48 orang	193,582,881	68 orang	440,189,118		4,673,400	32	124,307,500	32	192,825,539	16	99,363,425	80	421,169,864	-	4,673,400		1.58	
	28	SUB KEGIATAN :	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja		4,000,000								-				-	-	-	-	-	-		
	10	KEGIATAN :	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	80%	4,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0			
	29	SUB KEGIATAN :	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		4,000,000								-				-	-	-	-	-	-		

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	IV	PROG RAM :	PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota	46,60%	478,347,808	297 orang	115,539,182	46,35 %	112,996,026		16,833,870		18,821,628		45,840,718		23,830,466		105,326,682		29,398,290		6.15	
	11	KEGIATAN :	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	46,60%	109,793,560	20 orang	31,308,550	46,35 %	27,447,880		0		0		26,100,040		997,600		27,097,640		0		0.00	
	30	SUB KEGIATAN :	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)		53,896,940														-	-				

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	31	SUB KEGIATAN :	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja		55,896,620	20 orang	31,308,550	20 orang	27,447,880					20	26,100,040		997,600	20	27,097,640	-	-		-	
	12	KEGIATAN :	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	80%	356,554,248	80%	84,230,632	80%	85,548,146		16,833,870		18,821,628		19,740,678		22,832,866		78,229,042		29,398,290		8.25	
	31	SUB KEGIATAN :	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online		95,000,000														-	-	-	-		
	32	SUB KEGIATAN :	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)		261,554,248	3 orang	84,230,632	250 orang	85,548,146	91	16,833,870	51	18,821,628	53	19,740,678	94	22,832,866	289	78,229,042	117	29,398,290		11.24	
	13	KEGIATAN :	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI yang Dilindungi	80%	12,000,000		0		0	0	0		0		0		0		0		0			

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	33	SUB KEGIATAN :	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		12,000,000												-		-		-			
	V	PROGRAM :	HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,03%	86,471,200	1 kasus	18,964,680	4,03%	27,617,300		4,265,900		0		1,564,000		17,138,750		22,968,650		4,265,900		4.93	
	14	KEGIATAN :	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	75%	86,471,200	1 kasus	18,964,680	75%	27,617,300		4,265,900		0		1,564,000		17,138,750		22,968,650		4,265,900		4.93	

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	34	SUB KEGIATAN :	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah		68,471,200	50 perusahaan	15,153,280	7 perkara	23,538,150		2,577,400		-		1,245,000	7	15,816,100	7	19,638,500	-	2,577,400		3.76	
	35	SUB KEGIATAN :	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan		18,000,000	1 kasus	3,811,400	3 perkara	4,079,150	1	1,688,500		-	3	319,000		1,322,650	4	3,330,150	1	1,688,500		9.38	
	C		BIDANG PERINDUSTRIAN			3,060,184,276		1,079,628,392		1,768,934,759		198,312,997		189,890,091		327,675,827		918,960,168		1,634,839,083		344,244,161		11.25	
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	VI	PROGRAM :	PRERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri yang menerapkan Teknologi Tepat Guna	0,10%	2,943,265,196	0,52%	1,019,053,702	0,10%	1,411,096,619		178,826,297		179,771,283		297,363,927		683,300,797		1,339,262,304		314,638,653		10.69	
				Persentase sentra/klaster industri yang tertata	20%		75%		20%																

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	15	KEGIATAN :	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67%	2,943,265,196	5 dokumen	1,019,053,702	66,67%	1,411,096,619		178,826,297		179,771,283		297,363,927		683,300,797		1,339,262,304		314,638,653		10.69	
	36	SUB KEGIATAN :	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri		174,593,340			1 dokumen	174,593,340		99,000		3,658,750		1,367,300	1	127,061,250	1	132,186,300	-	3,757,750		2.15	
	37	SUB KEGIATAN :	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri		1,000,000,000	- 2 buku - 2 event	333,545,078	1 dokumen	555,687,870		72,381,004		48,827,700		117,691,120	1	300,161,377	1	539,061,201	-	121,208,704		12.12	

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	38	SUB KEGIATAN :	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri		120,000,000	10 IKM	29,572,080	1 dokumen	31,108,120				-		27,951,428	1	2,080,100	1	30,031,528	-	-		-	
	39	SUB KEGIATAN :	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri		1,063,671,856	13 orang	521,108,928	1 dokumen	507,653,731		85,096,958		110,417,273		100,226,761	1	201,285,550	1	497,026,542	-	151,555,304		14.25	
	40	SUB KEGIATAN :	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat		560,000,000	- 4 orang - 15 IKM	134,827,616	1 dokumen	142,053,558		21,249,335		16,867,560		50,127,318	1	52,712,520	1	140,956,733	-	38,116,895		6.81	

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	41	SUB KEGIATAN :	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri		25,000,000												-	-	-	-	-			
	VI I	PROGRAM :	PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk	2,70%	104,919,080	8,40%	60,574,690	2,40%	357,838,140	19,486,700		10,118,808		30,311,900		235,659,371		295,576,779		29,605,508		28.22		
	16	KEGIATAN :	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku industri yang difasilitasi	24 IKM	104,919,080	6 IKM	60,574,690	6 IKM	357,838,140	19,486,700		10,118,808		30,311,900		235,659,371		295,576,779		29,605,508		28.22		

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	42	SUB KEGIATAN :	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS		104,919,080	6 IKM	60,574,690	1 dokumen	357,838,140		19,486,700		10,118,808		30,311,900	1	235,659,371	1	295,576,779	-	29,605,508		28.22	
	VI II	PROGRAM :	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk Ke Dalam SIINas	4 perusahaan	12,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0			

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	17	KEGIATAN :	Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri	66,67%	12,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0			
	43	SUB KEGIATAN :	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		4,000,000																			
	44	SUB KEGIATAN :	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	Jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		4,000,000																			

Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Yang Dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100		15
	45	SUB KEGIATAN :	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas		4,000,000																			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di dibidang Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Tugas Pokok :

Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Bidang Tenaga Kerja

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Tenaga Kerja.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Tenaga Kerja;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Tenaga Kerja;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Tenaga Kerja;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tenaga Kerja; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Tenaga Kerja terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelatihan Tenaga Kerja
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

4. Bidang Perindustrian

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Perindustrian.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perindustrian;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Industri;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Industri;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Pangan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Sandang dan Kerajinan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Logam, Elektronika, Kimia dan Bahan Bangunan

5. UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)

Tugas :

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dibidang Pelayanan dan Pengembangan Rendang.

Fungsi :

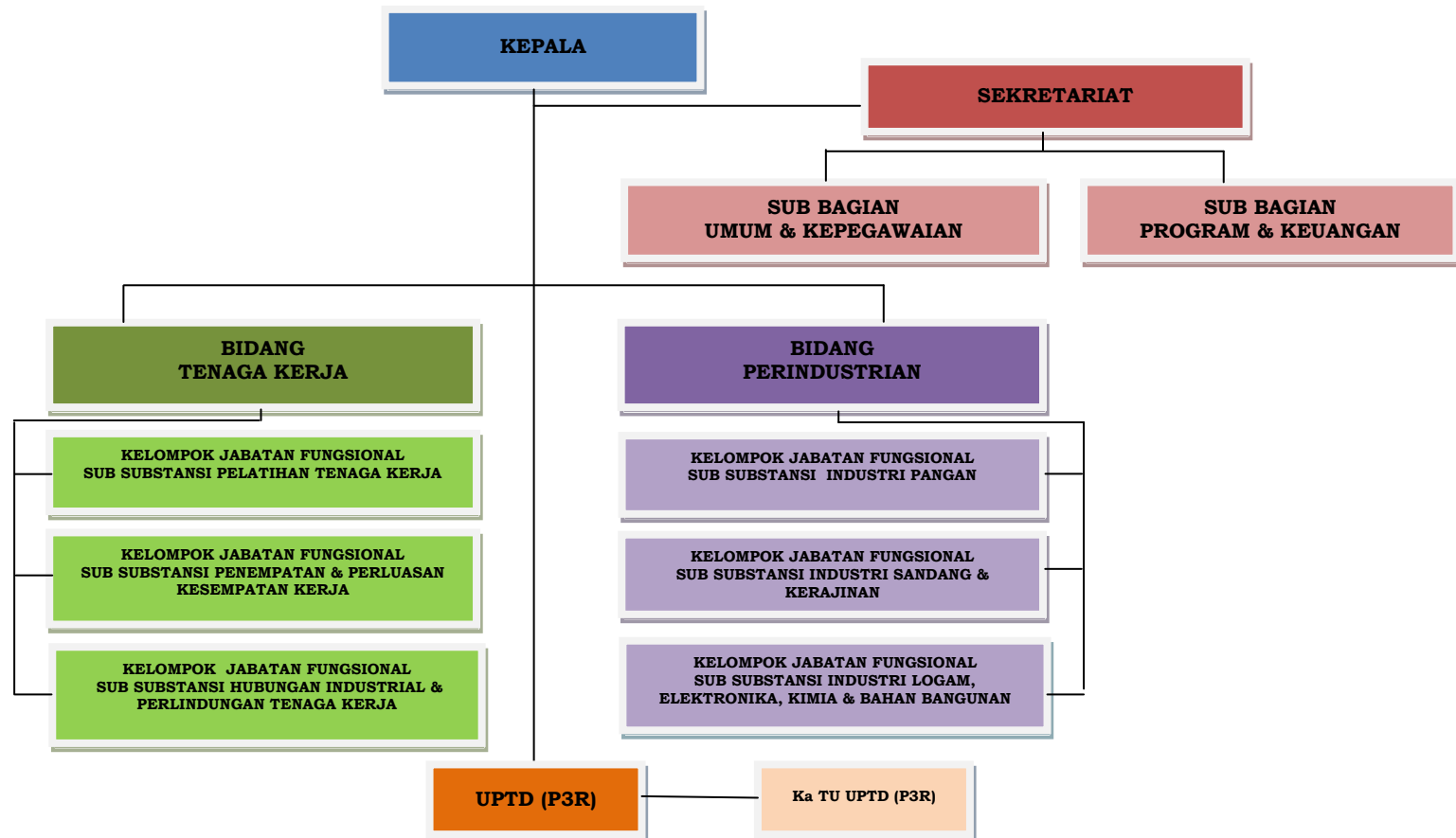
- a. Penggerakan pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
- b. Penggerakan peran serta dan pemberdayaan IKM;
- c. Pelaksanaan Pelayanan dan Pengembangan Rendang di Kota Payakumbuh.

UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) mempunyai :

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Adapun susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam bentuk bagan struktur adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



A. Urusan Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Wajib Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ditetapkan 1 (satu) IKU untuk urusan Ketenagakerjaan yaitu :

1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja, dengan rumusan jumlah penduduk usia kerja Tahun n dibagi jumlah angkatan kerja Tahun n dikali seratus persen

Hasil analisis pencapaian indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2023 realisasi sebesar 95,16% dari target yang ditetapkan sebesar 93,75%, yaitu 74.137 orang jumlah penduduk usia kerja Tahun 2023 dengan 77.907 orang jumlah angkatan kerja Tahun 2023.

Faktor pendukung dan program tersebut diatas melalui APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi. Untuk Tahun 2023 kegiatan berupa pelatihan processing roti/kue dengan peserta 48 orang (3 angkatan).

Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 2 Mei sampai dengan 26 Mei 2023, Angkatan II dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 21 Juni 2023, Angkatan III dilaksanakan pada tanggal 8 November sampai dengan 30 November 2023 dan pelatihan menjahit dasar dengan peserta 32 orang (2 angkatan). Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 20 Juli sampai dengan 11 Agustus 2023 dan angkatan II dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus sampai dengan 6 September 2023. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di Ruang Work Shop BLK Kota Payakumbuh.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja pada Kegiatan dengan Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.

➤ Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan kewirausahaan dengan jumlah peserta 20 orang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 7 Juli 2023 yang bertempat di Hotel Mangkuto

➤ Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Kegiatan pembuatan AK-1 bagi pencari kerja yang dilakukan di Mall Pelayanan Publik (MPP), Informasi Bursa Kerja Online tentang lowongan pekerjaan melalui sistem Ketenagakerjaan (SISNAKER) Kementerian Tenaga Kerja. Melalui aplikasi Sisnekaer ini, seluruh masyarakat pencari kerja dan masyarakat usia kerja dapat memperoleh segala bentuk informasi terkait dengan ketenagakerjaan, seperti Lowongan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan dll. Selain melalui aplikasi Sinaker, penyebarluasan informasi bursa kerja melalui media sosial seperti Facebook, Instagram Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

3. Program Hubungan Industrial pada Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dimana dari 3 kasus yang ditargetkan untuk difasilitasi penyelesaiannya 4 kasus yang masuk.

B. Urusan Perindustrian

Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Pilihan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ditetapkan 1 (satu) IKU untuk urusan Perindustrian yaitu :

1. Peningkatan Nilai Produksi, dengan rumusan nilai produksi Th (n)- nilai produksi Th (n-1) dibagi nilai produksi Th (n-1) kali seratus persen

Hasil analisis pencapaian indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,63% dari target yang ditetapkan sebesar 3,00%. Yaitu nilai produksi Tahun 2022 sebesar Rp. 269.426.788.000,- mengalami kenaikan untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 284.598.221.000,-.

Faktor pendukung dan program tersebut diatas melalui APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 yaitu :

- Penyusunan Dokumen RPIK Tahun 2023-2043
- Pelaksanaan Focus Grup Discussion (FGD)
- Operasional Dekranasda Kota Payakumbuh
- Workshop kerajinan dari bambu dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juni 2023 dengan peserta sebanyak 15 orang
- Muslim Fashion Festival + (Muffest) 2023, event ini diselenggarakan oleh Indonesian Fashion Chamber (IFC) bekerjasama dengan Ditai pada tanggal 7 - 10 Maret 2023 di The Westin Hotel, Jakarta
- Payakumbuh Local Brand, Event ini dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juni 2023 di Gor M. Yamin Payakumbuh

- World Islamic Entrepreneur Summit (WIES) pada tanggal 6-9 September 2023 di Hotel Pangeran Beach, Padang
 - Spotlight Tahun 2023, event ini dilaksanakan tanggal 15-19 November 2023 di Posbloc, Jakarta
 - Pengadaan Benang, Benang-benang tersebut kemudian diserahkan kepada Sentra Tenun Balai Panjang
 - Pelatihan dan workshop penguatan peralatan produksi bagi IKM melalui TTG, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 25 s.d 27 Juli 2023 dengan peserta 10 orang, yang dilaksanakan di Bengkel Surau Pandam Teknik di Kelurahan Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur
 - Kegiatan pelatihan batik cap, yang dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 27 September 2023 dengan peserta 15 orang
 - Gallery Kriya Dekranasda di Mall Pelayanan Kota Payakumbuh
 - Kegiatan UPTD P3R Sentra Rendang
 - Operasional Rutin. Operasional rutin terkait dengan penyelenggaraan administrasi tata usaha, praktek produksi, kebersihan, rapat penyambutan tamu, pembayaran listrik, belanja jasa (operator mesin, kebersihan dan keamanan)
 - Pemeliharaan. Pekerjaan ini meliputi pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga serta pemeliharaan gedung kantor
 - Kegiatan Produksi Rendang
 - Kunjungan Tamu ke UPTD P3R Sentra Rendang
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 yaitu :

- Pelatihan Perizinan Berusaha Sektor Industri (NIB dan Sertifikasi), Pelatihan dilaksanakan selama 4 (empat) hari tanggal 6-9 Februari 2023 bertempat di Aula Sentra Rendang, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan jumlah peserta sebanyak 18 orang
- Fasilitasi Sertifikasi Halal, Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi IKM ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pengadaan Swakelola Tipe III
- Pelatihan Keamanan Pangan (CPPOB dan HACCP), pelatihan ini dilaksanakan di Aula Sentra Rendang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada tanggal 3-4 Mei 2023 dengan peserta sebanyak 10 orang
- Fasilitasi Sertifikasi HACCP
- Verifikasi/Pengawasan Perizinan
- Lomba Desain Motif Batik Payakumbuh, Peserta yang mendaftar sebanyak 21 orang dengan jumlah desain motif yang disampaikan sebanyak 28 desain. Penilaian dilaksanakan dalam 2 tahap
- Fasilitasi ISO 22000
- Payakumbuh Fashion Carnival, Kegiatan dilaksanakan di Kawasan Pasar Payakumbuh, pada tanggal 14 Desember 2023

Untuk Tahun Anggaran 2024, merupakan tahun ke 2 (kedua) dari Rencana Strategis Empat Tahun (2023-2026) yang memuat Program dan Kegiatan untuk menindaklanjuti pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh periode 2023-2026 dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang dilengkapi indikator capaian kinerja terukur dari masing-masing program dan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja Dinas berdasarkan Perubahan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja berdasarkan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel II.2.

Tabel II.2
KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Menurunnya angka pengangguran			Tingkat pengangguran	%	6.47				6,68						
				Persentase penempatan tenaga kerja formal	%	57.00				65,52						
				Persentase penyerapan tenaga kerja informal	%	33.00				43,89						
				Persentase penyerapan tenaga kerja	%		93,55	93,75	93,75		98,96	94,84	95,16	93,75	3,30	
2	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	6.08				6,6						
				Persentase peningkatan nilai produksi	%	2.00	2,50	3,00	3,00	- 13,8%	15,32	3,1	5,63	3,25		
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Hasil penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa realisasi capaian Tahun 2023 belum dapat diukur sebagian besar dikarenakan memerlukan sinkronisasi, konsolidasi serta sinergisitas dari stakeholder atau lintas sektor terkait dengan data capaian indikator kinerja. Adapun hal perlu perhatian terdapat pada :

a. Indikator persentase penyerapan tenaga kerja

Terjadi peningkatan serapan tenaga kerja dari target yang ditetapkan sebesar 93,75% dengan terealisasi sebesar 95,16% dengan peningkatan capaian sebesar 1,41%, hal ini disebabkan banyaknya penduduk usia kerja yang mendapatkan lowongan pekerjaan dari perusahaan sehingga formasi dapat dipenuhi oleh pencari kerja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

b. Indikator persentase peningkatan nilai produksi

Nilai investasi sektor industri di Kota Payakumbuh diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah IKM di Kota Payakumbuh. Nilai produksi industri di Kota Payakumbuh melebihi target sebesar 3,00% dengan realisasi sebesar 5,63%. Kondisi ini dipicu oleh banyaknya pelaku IKM Kota Payakumbuh yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi salah satu persyaratan wajib bagi pelaku usaha dalam berbagai urusan, sehingga IKM yang dulunya belum memiliki izin usaha sekarang menjadi suatu keharusan bagi IKM untuk memiliki izin usaha. Sebagai gambaran di Tahun 2022 jumlah IKM Kota Payakumbuh berkisar 2.000 unit usaha, Tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 2.454 unit usaha, meningkat lebih kurang 454 IKM. Dengan peningkatan jumlah IKM di Kota Payakumbuh tentu Nilai produksi juga ikut terdongkrak, meskipun di Tahun 2019 hingga Tahun 2021 kondisi ekonomi memburuk akibat pandemi Covid-19 serta di Tahun 2022 terjadi inflasi dan kenaikan harga BBM, target nilai produksi masih dapat dicapai.

2. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

- 1) Keterbatasan SDM pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- 2) Masih rendahnya jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja;
- 3) Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik, karena tidak memiliki kompetensi/kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- 4) Belum meratanya perlindungan tenaga kerja (terutama hak-hak tenaga kerja, jaminan kesehatan/keselamatan kerja, proteksi keselamatan kerja, hak-hak pensiun);
- 5) Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerjasama tenaga kerja ke luar negeri dan luar daerah;
- 6) Masih adanya hubungan kerja yang kurang harmonis antara pemberi kerja dan pekerja;
- 7) Masih rendahnya daya saing pencari kerja siap pakai;
- 8) Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru;
- 9) Belum memadainya kapasitas wirausaha untuk pengembangan usaha;
- 10) Masih rendahnya kesadaran pemahaman akan kewajiban mendaftarkan lowongan kerja ke Disnakerperin;
- 11) Masih kurangnya pemahaman tentang peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan oleh pekerja dan pemberi kerja;
- 12) Rendahnya produktifitas usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM), disebabkan oleh :
 - a. Belum optimalnya penerapan teknologi industri;
 - b. Rendahnya kualitas SDM pelaku industri.
- 13) Terbatasnya kualitas produk IKM, disebabkan oleh :
 - a. Masih rendahnya kualitas input bahan baku dan bahan penolong;
 - b. Masih rendahnya mutu produk akibat dari rendahnya standadisasi proses produksi;
 - c. Masih kurangnya sinergisitas antara pelaku industri dan pemasok bahan baku yang berkualitas.

- 14) Belum optimalnya pemasaran produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Payakumbuh, disebabkan oleh :
 - a. Promosi produk yang belum optimal;
 - b. Belum adanya sistem khusus yang mendukung pemasaran produk-produk IKM Kota Payakumbuh;
 - c. Belum adanya sinergi antara industri kecil, menengah dan besar dalam kerjasama produksi maupun pemasaran.
- 15) Minimnya akses modal bagi pelaku usaha :
 - a. Kebijakan investasi (penanaman modal) yang belum maksimal;
 - b. Belum kuatnya lembaga/kelompok industri pada kegiatan usaha bersama.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah :

- 1) Pengaruh globalisasi disemua sektor utama berlakunya era perdagangan bebas kawasan ASEAN;
- 2) Lemahnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global sehingga menghambat dalam penciptaan lapangan kerja;
- 3) Kemampuan penguasaan bahasa asing dan teknologi informasi atau komunikasi yang belum mampu bersaing dengan daerah atau negara lain;
- 4) Keterbatasan data konkret dan akurat terkait ketenagakerjaan di Kota Payakumbuh serta kebijakan yang belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah serta dalam penyerapan tenaga kerja;
- 5) Dengan adanya kenaikan harga BBM yang membawa dampak kepada produksi produk IKM.

3. Dampak Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Hambatan

Dampak Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Hambatan

- a. Terhadap Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah
Tingkat kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang merupakan upaya dalam rangka penvapaian tujuan dan sasaran Kota Payakumbuh sebagaimana tertuang dalam

RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, yang mana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mendukung pelaksanaan tujuan yaitu Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, yang sasarannya yaitu Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran dan Meningkatnya Sektor Strategis.

Adapun dampak kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam mencapai tujuan dan sasaran Kota Payakumbuh dapat dilihat dari meningkatnya target setiap tahunnya dan tercapainya realisasi fisik dan penyerapan anggaran yang tepat waktu.

- Terjadi peningkatan serapan tenaga kerja dari target yang ditetapkan sebesar 93,75% dengan terealisasi sebesar 95,15% dengan peningkatan capaian sebesar 1,41%, hal ini disebabkan banyaknya penduduk usia kerja yang mendapatkan lowongan pekerjaan dari perusahaan sehingga formasi dapat dipenuhi oleh pencari kerja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan;
- Nilai investasi sektor industri di Kota Payakumbuh diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah IKM di Kota Payakumbuh. Nilai produksi industri di Kota Payakumbuh melebihi target sebesar 3,00% dengan realisasi sebesar 5,63%. Kondisi ini dipicu oleh banyaknya pelaku IKM Kota Payakumbuh yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi salah satu persyaratan wajib bagi pelaku usaha dalam berbagai urusan, sehingga IKM yang dulunya belum memiliki izin usaha sekarang menjadi suatu keharusan bagi IKM untuk memiliki izin usaha. Sebagai gambaran di Tahun 2022 jumlah IKM Kota Payakumbuh berkisar 2.000 unit usaha, Tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 2.454 unit usaha, meningkat lebih kurang 454 IKM. Dengan peningkatan jumlah IKM di Kota Payakumbuh tentu Nilai produksi juga ikut terdongkrak, meskipun di Tahun 2019 hingga Tahun 2021 kondisi ekonomi memburuk akibat pandemi Covid-19 serta di Tahun 2022 terjadi inflasi dan kenaikan harga BBM, target nilai produksi masih dapat dicapai.

4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dampaknya, disimpulkan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian meliputi :

- a) Meningkatnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja;
- b) Keterbatasan lapangan kerja yang mengakibatkan potensi pengangguran lulusan sekolah atau perguruan tinggi meningkat;
- c) Hubungan industrial yang tidak kondusif menyebabkan penurunan produktifitas kerja;;
- d) Masih adanya pelanggaran norma dan syarat kerja;
- e) Belum maksimalnya komitmen pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan UMR;
- f) Belum optimalnya peningkatan daya saing usaha, terutama untuk IKM;
- g) Belum sinergisnya pengelolaan limbah industri kecil dengan lintas sektoral;
- h) Minimnya investasi di Sektor Sarana Perindustrian.

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian meliputi :

- a) Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pembangunan bidang ketenagakerjaan dan bidang perindustrian;
- b) Ketersedian gedung Balai Latihan Kerja dan sarana prasarana sebagai penunjang kegiatan pelatihan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- c) Terjalinnya hubungan yang baik dengan mitra ketenagakerjaan (Bipartit dan Tripartit);
- d) Potensi daerah lain dalam menyerap tenaga kerja;

- e) Tingginya motivasi masyarakat untuk berwirausaha;
- f) Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh dalam 3 tahun terakhir;
- g) Letak geografis Payakumbuh yang strategis pada perlintasan jalur ekonomi antara provinsi Sumatera Barat dengan Riau;
- h) Kebijakan Nasional tentang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- i) Terbinanya koordinasi yang baik dengan instansi vertikal di tingkat provinsi.

5. Formulasi Isu-isu Penting

Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan antara lain :

- 1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi pencari kerja sehingga mampu diserap oleh pangsa pasar, dapat didukung melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi, Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi;
- 2) Dalam rangka meningkatnya penyerapan tenaga kerja, melalui Program Penempatan Tenaga Kerja, Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
- 3) Dalam rangka meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, melalui Program Hubungan Industrial, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- 4) Dalam rangka meningkatkan nilai produksi industri pengolahan, melalui Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;
- 5) Dalam rangka meningkatnya jumlah produk industri yang mendapat sertifikat produk, melalui Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Diperoleh beberapa isu utama (**Isu-isu Strategis**) yang menjadi tolak ukur penyelenggaraan fungsi dan tugas kedinasan secara menyeluruh, diantaranya adalah :

1. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja;
2. Masih rendahnya produksi industri pengolahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dalam review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan. Proses tersebut dilakukan adalah dalam upaya mensinergikan perencanaan program/kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD Kota Payakumbuh dengan Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah.

Alasan proses tersebut dilakukan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan

pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel II.3.

Tabel II.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KOTA PAYAKUMBUH

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4,675,747,587	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4,929,242,122	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Nilai Evaluasi AKIP Disnakerperin oleh Inspektorat	A	3,754,911,267	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Nilai Evaluasi AKIP Disnakerperin oleh Inspektorat	A	3,962,363,986	
			Nilai IKM	92				Nilai IKM	92		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	80%	96,015,750	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	80%	100,816,538	
1)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	29,652,750	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	31,135,388	
2)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	66,363,000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	69,681,150	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	80%	2,774,612,109	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	80%	2,913,342,714	

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	2,590,111,359	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	2,719,616,926.95	
4)	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	184,500,750	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	193,725,787.50	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	100%	27,377,944	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	100%	28,746,841	
5)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 paket	27,377,944	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 paket	28,746,841.20	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor	80%	214,296,600	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor	80%	225,011,430	
6)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	4,971,850	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	5,220,443	
7)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	27,455,300	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	28,828,065	
8)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	10,867,500	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	11,410,875	
9)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 paket	27,090,250	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 paket	28,444,763	

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	20,854,200	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	21,896,910	
11)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	3,008,400	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	3,158,820	
12)	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	12,321,100	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	12,937,155	
13)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	107,728,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	113,114,400	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ASN yang Memakai Barang Milik Daerah	100%	220,904,800	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ASN yang Memakai Barang Milik Daerah	100%	231,950,040	
14)	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	50,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	52,500,000	
15)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	15 unit	170,904,800	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	15 unit	179,450,040	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	80%	279,984,064	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	80%	313,690,423	

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	168,682,052	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	184,668,827	
17)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	111,302,012	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	129,021,596	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Sarana Prasarana Kantor yang Dibayarkan	80%	141,720,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Sarana Prasarana Kantor yang Dibayarkan	80%	148,806,000	
18)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39,190,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	41,149,500	
19)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	66,350,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	69,667,500	
20)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 unit	880,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 unit	924,000	
21)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 unit	25,300,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	26,565,000	
22)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	1 unit	10,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	1 unit	10,500,000	

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,97%	759,432,250	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,97%	797,403,863	
8	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80%	731,342,300	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80%	767,909,415	
23)	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160 orang	731,342,300	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160 orang	767,909,415	
9	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	80%	28,089,950	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	80%	29,494,448	
24)	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	12 lembaga	28,089,950	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	12 lembaga	29,494,447.50	
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	46,50%	133,665,620	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	46,50%	140,348,901	
10	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pencari Kerja yang Teraftar yang Ditempatkan	46,50%	52,505,800	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pencari Kerja yang Teraftar yang Ditempatkan	46,50%	55,131,090	

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25)	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	300 orang	52,505,800	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	300 orang	55,131,090	
11	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	80%	81,159,820	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	80%	85,217,811	
26)	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	250 orang	61,632,220	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	250 orang	64,713,831	
27)	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 orang	19,527,600	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 orang	20,503,980	
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,03%	27,738,450	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,03%	29,125,373	
12	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	75%	27,738,450	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	75%	29,125,373	

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28)	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7 Perkara	23,537,550	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7 Perkara	24,714,428	
29)	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	3 Perkara	4,200,900	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	3 Perkara	4,410,945	
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				643,787,510	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				675,976,886	
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Industri yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	0,10%	564,438,710	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Industri yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	0,10%	592,660,646	
			Persentase Sentra/Klaster Industri yang Tertata	20%				Persentase Sentra/Klaster Industri yang Tertata	20%		
13	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67%	564,438,710	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67%	592,660,646	

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	25,647,800	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	26,930,190	
31)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	199,186,501	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	209,145,826	
32)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	328,773,959	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	345,212,657	
33)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota		Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi	1 dokumen	10,830,450	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	11,371,973	
6	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Industri yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk	2,60%	60,657,900	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Industri yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk	2,60%	63,690,795	

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Jumlah Pelaku Industri yang Difasilitasi	6 IKM	60,657,900	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Jumlah Pelaku Industri yang Difasilitasi	6 IKM	63,690,795	
34)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 dokumen	11,726,300	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 dokumen	12,312,615.00	

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35)	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Sub Kegiatan Base Approach (OSS RBA)		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 dokumen	48,931,600	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Sub Kegiatan Base Approach (OSS RBA)		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 dokumen	51,378,180.00	
7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk Ke Dalam SIINas	1 perusahaan	18,690,900	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk Ke Dalam SIINas	1 perusahaan	19,625,445	
15	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Informasi Daerah	66,67%	18,690,900	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Informasi Daerah	66,67%	19,625,445	

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasioanl (SIINAS)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasioanl (SIINAS)	1 dokumen	7,959,350	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasioanl (SIINAS)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasioanl (SIINAS)	1 dokumen	8,357,317.50	
37)	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	10,731,550	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	11,268,127.50	
	UPTD PUSAT PELAYANAN DANPENGEMBANGAN RENDANG (P3R)				601,669,610					631,753,091	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Industri yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	0,10%	601,669,610	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk Ke Dalam SIINas	0,10%	631,753,091	
			Persentase Sentra/Klaster Industri yang Tertata	20%					20%		

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	66,67%	601,669,610	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Informasi Daerah	66,67%	631,753,091	
38)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	601,669,610	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	631,753,091	
TOTAL					5,921,204,707	TOTAL				6,236,972,098	

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD :

1. Untuk menunjang program prioritas daerah yaitu Kota Payakumbuh Bersih dan WTP, sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel maka terjadi rencana penyesuaian anggaran dari rancangan awal;
2. Untuk menunjang hasil Musrenbang dan Pokir, maka terjadi penambahan anggaran pada kegiatan pelatihan.

Oleh sebab itu berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2025 dan disesuaikan dengan analisis kebutuhan, maka pagu indikatif Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025 lebih besar dari Rancangan Awal RKPD.

Dalam tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut diatas meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, target sasaran program/kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk program kegiatan. Adapun untuk besarn pagu anggaran disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam hal ini adalah APBD Kota Payakumbuh, yang mana diprioritaskan untuk program kegiatan untuk pembangunan di Kota Payakumbuh, untuk urusan Tenaga Kerja dan urusan Perindustrian yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Yang mana Review terhadap Rancangan Awal RKPD sudah disesuaikan dengan usulan dari Musrenbang Kecamatan dan Pokir DPRD Kota Payakumbuh, terutama untuk kegiatan pelatihan yang diadakan di urusan Tenaga Kerja dan urusan Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan.

Adapun usulan program dan kegiatan di usulkan dalam Rencana Kerja (Renja) 2025 adalah dengan memperhatikan dan menindaklanjuti arah dan kebijakan pembangunan Tujuan dan Sasaran Walikota Payakumbuh khususnya dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian dari Rencana

Pembangunan Jangka Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh membuat Rencana Strategis (Renstra) untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Walikota Payakumbuh dimaksud dan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja ini dengan tidak lupa memperhatikan pemangku kepentingan baik dari masyarakat yang terkait langsung maupun dari Pemerintah.

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota yang ditindak lanjuti dengan Tingkat Kota, Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diusulkan atas hasil reses, serta responsive terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan.

Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi OPD saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Tenaga Kerja dan Perindustrian, sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai program dan kegiatan.

Usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat baik itu melalui Musrenbang maupun pokok pikiran DPRD yang berhubungan dengan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh akan terus diakomodir baik melalui pendanaan Kota maupun pengusulan pendanaan Provinsi maupun Pusat seperti dapat dilihat pada tabel II.4a dan II.4b.

Tabel II.4a1

**PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN PAYAKUMBUH TAHUN 2024
DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2024				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2025	Pagu Indikatif Tahun 2025	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
	KEC. PAYAKUMBUH BARAT						
1	Pelatihan Menjahit	Parak Batuang	Kurangnya keterampilan masyarakat		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	731,342,036	Setuju dengan ketentuan jumlah peserta secara keseluruhan hanya 16 orang, dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-
	KEC. PAYAKUMBUH UTARA						
1	Pelatihan Menjahit	Napar	Banyaknya anak muda di Kelurahan Napar yang belum memiliki pekerjaan dan belum punya skill		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	731,342,036	Setuju dengan ketentuan jumlah peserta secara keseluruhan hanya 16 orang, dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2024				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2025	Pagu Indikatif Tahun 2025	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
	KEC. PAYAKUMBUH TIMUR						
1	Pelatihan Menjahit	Koto Panjang	Kurangnya keterampilan warga dalam menambah income keluarga dan sebagai keterampilan tambahan bagi siswa yang baru tamat sekolah		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	731,342,036	Setuju dengan ketentuan jumlah peserta secara keseluruhan hanya 16 orang, dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-
2	Pelatihan Memasak Aneka Kue	Koto Panjang	Sebagai tambahan keterampilan penambah income keluarga		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	731,342,036	Setuju dengan ketentuan jumlah peserta secara keseluruhan hanya 16 orang, dengan plafon dana sebesar Rp. 87.000.000,-

Tabel II.4a2
PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN DAN E-POKIR
DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	E-POKIR				Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		
	Kegiatan Prioritas	Pengusul dan Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan / Sub Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2025	Pagu Indikatif Tahun 2025	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hibah sarana pertukangan dan perbengkelan	Mawi Etek Harianto		Rp. 194.000.000,- sebanyak 21 unit	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	199.186.400	Setuju, dengan catatan penerima dan proses pengajuan hibah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomoir 11 Tahun 2023 tentang Atas Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel II.4b
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KOTA PAYAKUMBUH

PD : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				
1	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
a	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Payakumbuh	Hibah sarana pertukangan dan perbengkelan	Rp. 194.000.000,- sebanyak 21 unit	Setuju, dengan catatan penerima dan proses pengajuan hibah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomoir 11 Tahun 2023 tentang Atas Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang berpijak pada Kebijakan Nasional dalam melaksanakan program dan kegiatan merupakan satu kesatuan dalam membantu tercapainya Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dimana semua program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan sepenuhnya bisa mendukung program pemerintah pusat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh merupakan tahapan dalam perumusan perencanaan dan penganggaran dan merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, Nasional dan Global serta tetap dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra. Renstra Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian secara substansi tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan :

1. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025;
2. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;

5. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

Serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan Urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kota Payakumbuh.

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 berlaku pada tanggal diundangkan 9 Juli 2021 dan ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan.

Visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan merupakan bagian dari visi dan misi pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional. Berikut adalah visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan.

1. Visi

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan visi Presiden–Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu, “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

2. Misi

Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 adalah :

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- b. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- c. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- d. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- e. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

- f. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- g. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- h. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden poin a, poin b, poin c, poin g, poin h dan poin i. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 tersebut yaitu :

- a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan;
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Ketenagakerjaan.
3. Tujuan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan :
- a. Mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;
 - b. Meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
 - c. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa yang akan datang;
 - d. Mewujudkan visi baru hubungan industrial dan dialog sosial ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
 - e. Mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;
 - f. Mewujudkan reformasi birokrasi yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;

- g. Mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.
- 4. Sasaran Strategis Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan sejumlah sasaran strategis, sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kontribusi terhadap produktivitas tenaga kerja nasional, di mana kontribusi ini merupakan kontribusi Kementerian Ketenagakerjaan terhadap produktivitas tenaga kerja nasional, yang dihitung berdasarkan besar upah yang diterima penduduk bekerja pada tahun t.
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.1.2 Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian periode Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, yang digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Di dalam renstra ini tertaung visi dan misi, Visi kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan Visi Presiden Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Sedangkan misi yang tempuh untuk mencapai visi tersebut adalah:

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, Kementerian Perindustrian menetapkan arah kebijakan pembangunan sektor industri pada pengembangan sumber daya industri, pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan perwilayahan industri, fiskal dan non fiskal serta kebijakan reformasi birokrasi, dengan berbagai strategi dan langkah operasional sebagai bentuk implementasi dari kebijakan yang telah direncanakan.

Strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh Kementerian Perindustrian adalah:

1. Pembangunan sumber daya manusia industri;
2. Pemanfaatan Sumber daya alam;
3. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
4. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
5. Penyediaan sumber pembiayaan;
6. Pengembangan standardisasi industri;
7. Pengembangan infrastruktur industri;
8. Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
9. Pengembangan industri kecil dan menengah;
10. Pengembangan industri hijau;
11. Pengembangan industri strategis;
12. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
13. Kerjasama internasional di bidang industri;
14. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;
15. Penetapan Kawasan Peruntukan Industri;
16. Program pembangunan kawasan industri;
17. Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM;
18. Upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor industri melalui pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi perusahaan industri *existing* dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas;
19. Upaya penguatan struktur industri nasional melalui pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi investasi baru sektor industri (khususnya industri pioner) atau perusahaan industri *existing* yang melakukan perluasan komoditi baru;

20. Upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi, dan penguasaan teknologi baru.

Kerhasilan pembangunan industri tidak hanya tergantung kepada Kementerian Perindustrian saja akan tetapi juga membutuhkan dukungan dari stakeholder lainnya, seperti pihak swasta, pemerintah daerah, akademisi maupun masyarakat luas.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA OPD

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam memenuhi tujuan dan sasarannya untuk kurun waktu satu tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, lebih dari itu perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Rumusan tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Meningkatnya produktifitas sector industri;
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah.

Tujuan ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah menerapkan prinsip Good Governance dilingkungan Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka peningkatan pelayanan yang mendasar harus diperbaiki, agar dapat mewujudkan peningkatan pelayanan dan menumbuhkan sikap akuntabel, maka harus ditunjang dengan system administrasi dan pemerintahan yang baik, sarana dan prasarana yang cukup, wawasan serta pengetahuan aparat yang luas serta regulasi peraturan yang mampu mempercepat pembangunan. Pada akhirnya keseluruhan tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada satu tahun ke depan dapat tercapai.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya serapan tenaga kerja;
2. Meningkatnya produksi industri pengolahan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi masyarakat, sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya telah mempertimbangkan beberapa hal diantaranya : Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah periode 2023-2026.

Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang tertuang di dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sangat memperhatikan program pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dilihat pada rencana kegiatan meningkatkan SDM angkatan kerja dan keterampilan angkatan kerja dengan melalui pelatihan dan pendidikan tenaga kerja, memfasilitasi penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Potensi ekonomi Kota Payakumbuh yang sebagian besar masyarakatnya bergerak dibidang IKM sangat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat, dimana IKM ini perkembangannya stabil tidak dipengaruhi oleh dampak globalisasi.

- b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 terdiri dari 7 Program, 15 Kegiatan dan 39 Sub kegiatan yang sebagian besar terfokus kepada menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran dan meningkatnya sektor strategis yang didukung oleh Kebijakan yang terukur dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja dan IKM dengan total kebutuhan dananya sebesar Rp. 6.702.416.707,- (enam milyar tujuh ratus dua juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

Untuk Tahun 2025 Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mengusulkan program sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang sumber dana berasal dari dana APBD dapat dilihat pada tabel III.1.

Tabel III.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA PAYAKUMBUH

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5.225.473.257				5.359.036.771
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Disnakerperin oleh Inspektorat		A	3.854.925.601			A	3.942.656.829
		Nilai IKM		92				92	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan		80%	95.975.300			80%	100.816.538
1)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 dokumen	29.652.800			4 dokumen	31.135.388

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 laporan	66.322.500			12 laporan	69.681.150
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas		80%	2.774.613.609			80%	2.913.342.713
3)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20 orang/bulan	2.590.114.409			20 orang/bulan	2.719.616.926
4)	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 dok	184.499.200			1 dok	193.725.787
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap		100%	31.625.000			100%	28.746.841
5)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		46 paket	31.625.000			46 paket	28.746.841
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor		80%	268.260.200			80%	225.011.431

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 paket	4.972.000			5 paket	5.220.443
7)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10 paket	27.890.000			10 paket	28.828.065
8)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6 paket	8.700.000			6 paket	11.410.875
9)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		57 paket	24.957.000			57 paket	28.444.763
10)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		7 paket	20.848.500			7 paket	21.896.910
11)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2 dokumen	3.010.700			2 dokumen	3.158.820

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12)	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 laporan	12.321.000			1 laporan	12.937.155
13)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 laporan	165.561.000			20 laporan	113.114.400
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang Memakai Barang Milik Daerah		100%	214.136.000			100%	231.950.040
14)	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 unit	44.530.000			2 unit	52.500.000
15)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		13 unit	169.606.000			13 unit	179.450.040
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor		80%	308.815.492			80%	293.983.266

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 laporan	168.682.052			2 laporan	177.116.154
17)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 laporan	140.133.440			12 laporan	116.867.112
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Sarana Prasarana Kantor yang Dibayarkan		80%	161.500.000			80%	148.806.000
18)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	42.950.000			1 unit	41.149.500

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 unit	80.870.000			12 unit	69.667.500
20)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		11 unit	2.380.000			11 unit	924.000
21)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		37 unit	25.300.000			37 unit	26.565.000
22)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi		1 unit	10.000.000			1 unit	10.500.000
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		3,97%	759.431.786			3,97%	797.403.863
8	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi		80%	731.342.036			80%	767.909.415

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23)	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		144 orang	731.342.036			144 orang	767.909.415
9	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		80%	28.089.750			80%	29.494.448
24)	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		12 lembaga	28.089.750			12 lembaga	29.494.448
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota		46,50%	133.665.570			46,50%	140.348.901
10	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan		46,50%	52.505.950			46,50%	55.131.090

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25)	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja		300 orang	52.505.950			300 orang	55.131.090
11	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja		80%	81.159.620			80%	85.217.811
26)	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		250 orang	61.632.170			250 orang	64.713.831
27)	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		30 orang	19.527.450			30 orang	20.503.980

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan		4,03%	477.450.300			4,03%	478.627.178
12	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama		75%	477.450.300			75%	478.627.178
28)	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		7 Perkara	23.537.550			7 Perkara	24.714.428

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29)	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		3 Perkara	4.200.900			3 Perkara	4.200.900
30)	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		3448 orang	449.711.850			3448 orang	449.711.850
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				643.774.140				674.976.885
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Industri yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna		0,10%	564.425.340			0,10%	592.660.646
		Persentase Sentra/Klaster Industri yang Tertata		20%				20%	

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		66,67%	564.425.340			66,67%	592.660.646
31)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		1 dokumen	25.647.800			1 dokumen	26.930.190
32)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1 dokumen	199.186.400			1 dokumen	209.145.826
33)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1 dokumen	328.760.690			1 dokumen	345.212.657

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi		1 dokumen	10.830.450			1 dokumen	11.371.973
6	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk		2,60%	60.657.900			2,60%	62.690.795
14	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Pelaku Industri yang Difasilitasi		6 IKM	60.657.900			6 IKM	62.690.795

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		1 dokumen	11.726.300			1 dokumen	11.312.615

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36)	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri asional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Sub Kegiatan Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		1 dokumen	48.931.600			1 dokumen	51.378.180

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk Ke Dalam SIINas		1 perusahaan	18.690.900			1 perusahaan	19.625.444
15	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informasi Daerah		66,67%	18.690.900			66,67%	19.625.444
37)	Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		1 dokumen	7.959.350			1 dokumen	8.357.317

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38)	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		1 dokumen	10.731.550			1 dokumen	11.268.127
	UPTD PUSAT PELAYANAN DANPENGEMBANGAN RENDANG (P3R)				833.169.310				833.169.461
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Industri yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna		0,10%	833.169.310			0,10%	833.169.461
		Persentase Sentra/Klaster Industri yang Tertata		20%				20%	
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		66,67%	833.169.310			66,67%	833.169.461

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 dokumen	833.169.310			1 dokumen	833.169.461
TOTAL					6.702.416.707		TOTAL		6.867.183.117

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian akan terus berlanjut dan di prioritaskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan rencana program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
6. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Untuk Tahun 2025 Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mengusulkan program kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang sumber dana berasal dari dana APBD dapat dilihat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN						5.869.247.397,00							6.034.013.656,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.225.473.257,00								5.359.036.771,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					5.225.473.257,00								5.359.036.771,00	
1,	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat	-			92 indeks A kategori	3.854.925.601,00						-	3.942.656.829,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiat an	-			80 persen	95.975.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Sumber Daya Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	100.816.538,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

Rencana Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	29.652.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, yang sehat, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		31.135.388,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	66.322.500,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		69.681.150,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Kruangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	-			80 persen	2.774.613.609,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempo erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	2.913.342.713,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.590.114.409,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		2.719.616.926,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

Rencana Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	184.499.200,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		193.725.787,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berpakaian Dinas Dengan Atribut Lengkap	-			100 persen	31.625.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	28.746.841,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				46 Paket	31.625.000,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		28.746.841,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersedian Sarana Penunjang Operasional Kantor	-			80 persen	268.260.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	225.011.431,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

Rencana Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4.972.000,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Schat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		5.220.443,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	27.890.000,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Schat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		28.828.065,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	8.700.000,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Schat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		11.410.875,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				57 Paket	24.957.000,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Schat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		28.444.763,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Rencana Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	20.848.500,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kcl/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Schat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		21.896.910,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.010.700,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Schat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		3.158.820,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12.321.000,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Schat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		12.937.155,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumiah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	165.561.000,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Schat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		113.114.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Rencana Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Yang Memakai Barang Milik Daerah	-			100 persen	214.136.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	231.950.040,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	44.530.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		52.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	169.606.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		179.450.040,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	-			80 persen	308.815.492,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	293.983.266,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

Rencana Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	168.682.052,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		177.116.154,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	140.133.440,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		116.867.112,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dibayarkan	-			80 persen	161.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	148.806.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	42.950.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		41.149.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

Rencana Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	80.870.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		69.667.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				11 Unit	2.380.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		924.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	25.300.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		26.565.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		10.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Rencana Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	-			3,97 %	759.431.786,00						-	797.403.863,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	-			80 persen	731.342.036,00			Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangka n Industri Kreatif serta Mengembangka n Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkta tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat/ pencari kerja	-	767.909.415,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				144 Orang	731.342.036,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangka n Industri Kreatif serta Mengembangka n Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkta tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat/ pencari kerja		767.909.415,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	-			80 persen	28.089.750,00			Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangka n Industri Kreatif serta Mengembangka n Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing 1. Peningkta tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	29.494.448,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Rencana Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				12 Lembaga	28.089.750,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirusahaan, Mengembangka n Industri Kreatif serta Mengembangka n Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Schat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		29.494.448,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3,	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kot a	-			46,50 %	133.665.570,00						-	140.348.901,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	-			46,50 persen	52.505.950,00			Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirusahaan, Mengembangka n Industri Kreatif serta Mengembangka n Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Schat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat/ pencari kerja	-	55.131.090,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														

Rencana Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				300 Orang	52.505.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat/ pencari kerja		55.131.090,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	-			80 persen	81.159.620,00			Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat/ pencari kerja	-	85.217.811,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumiah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				250 Orang	61.632.170,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat/ pencari kerja		64.713.831,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														

Rencana Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja				30 Orang	19.527.450,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangka n Industri Kreatif serta Mengembangka n Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat/ pencari kerja		20.503.980,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
4,	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerja an	-			4,03 %	477.450.300,00						-	478.627.178,00	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	-			75 persen	477.450.300,00			Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangka n Industri Kreatif serta Mengembangka n Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perusahaan dan pekerja	-	478.627.178,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota														

Rencana Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				7 Perkara	23.537.550,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangka n Industri Kreatif serta Mengembangka n Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perusahaan dan pekerja		24.714.428,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				3 Perkara	4.200.900,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perusahaan dan pekerja		4.200.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				3448 Orang	449.711.850,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirusuah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perusahaan dan pekerja		449.711.850,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Rencana Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						643.774.140,00							674.976.885,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						643.774.140,00							674.976.885,00	
1,	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna Persentase sentra/klaster industri yang tertata	-			0,10 % 20 %	564.425.340,00						-	592.660.646,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-			66,67 persen	564.425.340,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangka n Industri Berkasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM	-	592.660.646,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	25.647.800,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangka n Industri Berkasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM		26.930.190,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	199.186.400,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangka n Industri Berkasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM		209.145.826,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Rencana Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	328.760.690,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangka n Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM		345.212.657,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota														
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasi kan				1 Dokumen	10.830.450,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangka n Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM		11.371.973,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri yang menerapkan standarisasi mutu produk	-			2,60 %	60.657.900,00						-	62.690.795,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Industri Yang Difasilitasi	-			6 IKM	60.657.900,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangka n Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM	-	62.690.795,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														

Rencana Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			~Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	11.726.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM		11.312.615,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	48.931.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM		51.378.180,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Rencana Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah data perusahaan IKM yang masuk ke dalam SIINAS	-			1 perusahaan	18.690.900,00						-	19.625.444,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri	-			66,67 persen	18.690.900,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangka n Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM	-	19.625.444,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kot a Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	7.959.350,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangka n Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM		8.357.317,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kot a dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	10.731.550,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangka n Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM		11.268.127,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG (P3R)						833.169.310,00							833.169.461,00	

Rencana Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						833.169.310,00							833.169.461,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						833.169.310,00							833.169.461,00	
1,	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna e sentra/klaster industri yang tertata	-			0,10 %20 %	833.169.310,00						-	833.169.461,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-			66,67 persen	833.169.310,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangka n Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM	-	833.169.461,00	UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG (P3R)
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	833.169.310,00	Kota Payakumbu h, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangka n Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM		833.169.461,00	UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG (P3R)
	J U M L A H							6.702.416.707,00							6.867.183.117,00	

Disamping itu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mengajukan usulan pembangunan Tahun 2025 yang dibiayai dari dana APBN yang dapat dilihat pada tabel IV.2.

Tabel IV.2
USULAN PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
SUMBER DANA APBN
TAHUN ANGGARAN 2025

PD : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Out Put (Proyek) K/L	Program K/L	Kegiatan K/L	Target	Usulan Pagu (Rp.)	Lokasi		Ket.
								Provinsi	Kab/Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	TENAGA KERJA									
1	Prioritas Nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan Nasional dan jaminan sosial bidang Ketenagakerjaan	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pencari kerja/orang	320,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Pelatihan menjahit dan bantuan peralatan mesin jahit dengan peserta 32 orang
2	Prioritas Nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan Nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pencari kerja/orang	275,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Pelatihan membuat kue/roti dan bantuan peralatan membuat kue/roti dengan peserta 32 orang

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Out Put (Proyek) K/L	Program K/L	Kegiatan K/L	Target	Usulan Pagu (Rp.)	Lokasi		Ket.
								Provinsi	Kab/Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Prioritas Nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan Nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pencari kerja/orang	900,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Pelatihan kompetensi : otomotif, las prosesing dan busana dengan peserta 64 orang (4 angkatan)
4	Prioritas Nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan Nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pencari kerja/orang	600,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Pelatihan kewirausahaan bagi kelompok usaha masyarakat dengan peserta 32 orang (2angkatan)
5	Kementerian Tenaga Kerja	Peningkatan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja	Meningkatnya pelayanan kepada pencari kerja dalam pembuatan AK 1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pencari kerja yang dilayani	275,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Operasional pelayanan AK1
6	Prioritas Nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Perluasan cakupan penerima jaminan kesehatan Nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan	200,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan peserta 100 perusahaan

Rencana Kerja Tahun 2025

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Out Put (Proyek) K/L	Program K/L	Kegiatan K/L	Target	Usulan Pagu (Rp.)	Lokasi		Ket.
								Provinsi	Kab/Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	PERINDUSTRIAN									
1	Kementerian Perindustrian	Direktorat Jendral Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Peningkatan Teknologi Proses Produksi IKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	IKM	200,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Bantuan peralatan (teknologi) produksi untuk IKM
			Peluang kerjasama Produksi (kemitraan IK dan IM atau IB)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	IKM	200,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Fasilitasi kerjasama produksi antara IK dengan IM atau IB yang sudah memiliki pasar namun masih terbatas pada kapasitas produksi
			Pengembangan Keahlian SDM Pengelola IKM dan ASN yang membidangi industri, Khususnya bidang Produksi, Pemasaran dan Kurasi Produk	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	IKM dan ASN	300,000,000	Sumatera Barat	Payakumbuh	Pelatihan untuk meningkatkan keahlian pelaku IKM dan ASN Pembina Industri

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Pelaksanaan Program Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah urusan Tenaga Kerja dan urusan Perindustrian, yang mengacu kepada RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang dalam program prioritas pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2025, yang memuat tentang arah kebijakan, program kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dan pagu indikatif dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam mencapai hasil tersebut. Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Rencana Strategis Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan memudahkan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk proving (Membuktikan) kinerja dan untuk improving (Memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Rencana Kerja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap sub kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintah maupun di luar pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalisasi pencapaian target tahunan Renstra Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh di Tahun 2025.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025, yang memuat program kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2025, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas, yang mengacu pada kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja mengacu pada :
 - a. Program Pembangunan Nasional;
 - b. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
 - c. Renstra Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
 - d. RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024;
 - e. Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya;
 - f. Berdasarkan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat.
2. Rencana Kerja memuat :
 - a. Sasaran dan indikator kinerja Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh;
 - b. Program dan kegiatan;

- c. Indikator kinerja;
- d. Rencana tingkat capaian (target);
- e. Pagu indikatif dan prakiraan maju.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang direkomendasikan oleh Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Penetapan prioritas pembangunan urusan Tenaga Kerja dan urusan Perindustrian secara terkoordinir, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan;
2. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam program pembangunan urusan Tenaga Kerja dan urusan Perindustrian;
3. Pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
4. Adanya upaya peningkatan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja.

Demikian Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran urusan Tenaga Kerja dan urusan Perindustrian yang menjadi tugas dan fungsi Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Agustus 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh



YUNIDA FATWA, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670601 198809 2 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara

Telp/Fax. (0752) 7971800 Email : disnakerprin@gmail.com Website :

<https://disnakerin.payakumbuhkota.go.id>

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
GENDER BUDGET STATEMENT

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota
Payakumbuh

TAHUN ANGGARAN : 2025

Program	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
Sub Kegiatan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
Kode kegiatan	2.07.03.2.01.01 (Sesuai RKA-SKPD)
Analisis Situasi	1. Data Pembuka Wawasan a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja (Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), Tenaga kerja dalam pembangunan Nasional merupakan factor dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun sebagai konsumen. Ketidakseimbangan dalam penyebaran penduduk antar daerah atau wilayah mengakibatkan tidak proporsionalnya penggunaan tenaga kerja secara regional dan sektoral sehingga menghambat pula laju pertumbuhan perekonomian Nasional. b. Tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan social, mengurangi atau menghapus

	kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran, sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi daerah menghendaki adanya kerjasama diantara pemerintah, sector swasta dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja seluas-luasnya. c. Angka proyeksi Tahun 2023 untuk Kota Payakumbuh, jumlah Angkatan Kerja yang bekerja sebanyak 74,137 orang dan jumlah Pengangguran sebanyak 3.770. Hal ini berarti ada penurunan Pengangguran dan ada kenaikan jumlah Angkatan Kerja yang bekerja. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Payakumbuh Tahun 2023 mengalami penurunan yang sebelumnya Tahun 2022 sebesar 5,16% dan di Tahun 2023 sebesar 4,84%*. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh perekonomian yang mulai stabil terutama di bidang industry maupun UMKM. d. Meskipun tingkat pengangguran di Kota Payakumbuh mengalami penurunan dari 5,16% menjadi 4,84%*, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh akan tetap menjadi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Tingkat pengangguran untuk Tahun 2023 di Kota Payakumbuh berjumlah 3.770 orang. Tingkat pengangguran banyak didominasi oleh laki-laki sebanyak 1.696 orang sedangkan perempuan sebanyak 2.074 orang. e. Menyikapi permasalahan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melakukan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi yang bertujuan
--	---

	untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja. f. Dengan pelatihan ini tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. g. Untuk Tahun 2024 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja dilaksanakan dengan jumlah peserta 240 orang. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan ➤ Dari aspek akses : Belum terbukanya akses perempuan dan laki-laki dalam melakukan kegiatan pelatihan tersebut. ➤ Dari aspek partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat tinggi peminat dalam melakukan kegiatan pelatihan tersebut. ➤ Dari aspek control : Tingginya peminat perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap apakah kegiatan itu berjalan dengan baik menjadi sangat terbuka untuk perempuan. ➤ Dari aspek manfaat : Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti pelatihan menjahit, pelatihan membuat aneka kue/roti, pelatihan MUA, pelatihan babershop, pelatihan service HP dan pelatihan menjahit bad cover. b. Penyebab Internal ➤ Masih minimnya pahaman konsep Gender oleh peminat (Pencari kerja). ➤ Masih adanya pembatasan antara laki dan perempuan untuk ikut kegiatan pelatihan. ➤ Adanya kesenjangan tingginya tingkat pengangguran perempuan. ➤ Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti pelatihan menjahit,
--	--

	pelatihan membuat aneka kue/roti, pelatihan MUA, pelatihan babershop, pelatihan service HP dan pelatihan menjahit bad cover. c. Penyebab Eksternal ➤ Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gander bahwa gander adalah mendahulukan perempuan. ➤ Adanya budaya patriarki masih mengutamakan kaum pria dalam hal hal yang seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll. ➤ Terbatasnya akses dan kapasitas laki-laki.		
Rencana Tindak	Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
		Tujuan	Meningkatnya Keterampilan Para Pencari Kerja
		Aktivitas 1	1. Pelaksanaan pelatihan menjahit, pelatihan membuat aneka kue/roti, pelatihan MUA, pelatihan babershop, pelatihan service HP dan pelatihan menjahit bad cover. 2. Menyeleksi dan menetapkan peserta pelatihan pelatihan menjahit, pelatihan membuat aneka kue/roti, pelatihan MUA, pelatihan babershop, pelatihan service HP dan pelatihan menjahit bad cover dari peserta yang mendaftar. 3. Menyelenggarakan pelatihan menjahit, pelatihan membuat

			aneka kue/roti, pelatihan MUA, pelatihan babershop, pelatihan service HP dan pelatihan menjahit bad cover. 4. Membuat laporan kegiatan Input : 1) Masyarakat dan pencari kerja 2) Peserta pelatihan menjahit, pelatihan membuat aneka kue/roti, pelatihan MUA, pelatihan babershop, pelatihan service HP dan pelatihan menjahit bad cover. 3) Narasumber dari Kota Payakumbuh 4) Sarana prasarana : Peralatan untuk pelatihan processing aneka kue/roti, pelatihan menjahit, pelatihan MUA, pelatihan babershop, pelatihan service HP, pelatihan menjahit bad cover. Output : Terlaksananya pelatihan processing aneka kue/roti, pelatihan menjahit, pelatihan MUA, pelatihan babershop, pelatihan service HP, pelatihan bad cover bagi masyarakat/pencari kerja Kota Payakumbuh.
Sumber Dana	Rp. 731.342.036,-		
Outcomes	Pelaksanaan pelatihan processing aneka kue/roti, pelatihan menjahit, pelatihan MUA, pelatihan babershop, pelatihan service HP dan pelatihan bad cover		

	Rumusan Kinerja : 1) Meningkatnya wawasan dan pengetahuan serta keterampilan bagi pencari kerja. Indikator Kinerja : 1) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 144 orang. 2) Tersedianya keterampilan pencari kerja yang siap bersaing di pasar kerja.
--	---

Payakumbuh, 8 Juli 2024
 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 Kota Payakumbuh




NIDA FATWA, S.Sos,M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670601 198809 2 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara

Telp/Fax. (0752) 7971800 Email : disnakerprin@gmail.com Website : <https://disnakerin.payakumbuhkota.go.id>

GENDER ANALYSIS PATHWAY DAN POLICY OUTLOOK FOR PLAN OF ACTION (GAP)

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program/Kegiatan/Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi Prioritas/Kegiatan/Indikator	Baseline Data	Target Kinerja/Indikator Gender
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja (Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), Tenaga kerja dalam pembangunan Nasional merupakan factor dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun sebagai konsumen. Ketidakseimbangan dalam penyebaran penduduk antar daerah atau wilayah mengakibatkan tidak proporsionalnya penggunaan tenaga kerja secara regional dan sektoral sehingga menghambat pula laju pertumbuhan perekonomian Nasional.	Untuk Tahun 2024 diadakan pelatihan menjahit, pelatihan membuat aneka kue/roti, pelatihan MUA, pelatihan babershop, pelatihan service HP dan pelatihan menjahit bad cover sebanyak 240 orang, yang mayoritas perempuan.	a) Masih minimnya pahaman konsep Gender oleh peminat (Pencari kerja) b) Masih adanya pembatasan antara laki dan perempuan untuk ikut kegiatan pelatihan c) Adanya kesenjangan tingginya tingkat pengangguran perempuan d) Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti pelatihan menjahit, pelatihan membuat aneka kue/roti, pelatihan MUA, pelatihan babershop, pelatihan service HP dan pelatihan menjahit bad cover.	a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender bahwa gender adalah mendahulukan perempuan b) Adanya budaya mengutamakan kaum pria dalam hal hal yang seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll c) Terbatasnya akses dan kapasitas laki-laki	Meningkatkan kualitas dan produktifitas SDM pencari kerja sehingga meningkat pula kesejahteraan Tenaga Kerja.	Pelaksanaan pelatihan processing aneka kue/roti, pelatihan menjahit, pelatihan MUA, pelatihan cukur, pelatihan service HP, pelatihan bad cover dan pelatihan bahasa jepang 1) Menyeleksi dan menetapkan peserta pelatihan Pelaksanaan pelatihan processing aneka kue/roti, pelatihan menjahit, pelatihan MUA, pelatihan cukur, pelatihan service HP, pelatihan bad cover dan pelatihan bahasa jepang dari peserta yang mendaftar 2) Menyelenggarakan Pelaksanaan pelatihan processing aneka kue/roti, pelatihan menjahit, pelatihan MUA, pelatihan cukur, pelatihan service HP, pelatihan bad cover dan pelatihan bahasa jepang 3) Membuat laporan kegiatan	Input : 1) Masyarakat dan pencari kerja 2) Peserta pelatihan processing aneka kue/roti, pelatihan menjahit, pelatihan MUA, pelatihan cukur, pelatihan service HP, pelatihan bad cover dan pelatihan bahasa jepang 3) Narasumber dari Kota Payakumbuh 4) Sarana prasarana : Peralatan untuk pelatihan processing aneka kue/roti, pelatihan menjahit, pelatihan MUA, pelatihan cukur, pelatihan service HP, pelatihan bad cover dan pelatihan bahasa jepang dan bahan percontohan Output : Terlaksananya pelatihan processing aneka kue/roti, pelatihan menjahit, pelatihan MUA, pelatihan cukur, pelatihan service HP,	Rumusan Kinerja : 1) Meningkatnya wawasan dan pengetahuan serta keterampilan bagi pencari kerja Indikator Kinerja : 1) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan processing aneka kue/roti, pelatihan menjahit, pelatihan MUA, pelatihan cukur, pelatihan service HP, pelatihan bad cover dan pelatihan bahasa jepang sebanyak 240 orang. 2) Tersedianya keterampilan pencari kerja yang siap bersaing di pasar kerja

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program /Kegiatan/Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi Prioritas/Kegiatan/Indikator	Baseline Data	Target Kinerja/Indikator Gender
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	2) Tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan social, mengurangi atau menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran, sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi daerah menghendaki adanya kerjasama diantara pemerintah, sector swasta dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja seluas-luasnya.	Dengan keterlibatan mayoritas perempuan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, maka menimbulkan beberapa permasalahan kesenjangan sbb:					pelatihan bad cover dan pelatihan bahasa jepang bagi masyarakat/pencari kerja Kota Payakumbuh.	
Tujuan Meningkatnya Keterampilan Para Pencari Kerja	3) c. Angka proyeksi Tahun 2023 untuk Kota Payakumbuh, jumlah Angkatan Kerja yang bekerja sebanyak 74,137 orang dan jumlah Pengangguran sebanyak 3.770. Hal ini berarti ada penurunan Pengangguran dan ada kenaikan jumlah Angkatan Kerja yang bekerja. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Payakumbuh Tahun 2023 mengalami penurunan yang sebelumnya Tahun 2022 sebesar 5,16% dan di Tahun 2023 sebesar 4,84%*. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh perekonomian yang mulai stabil terutama di bidang industry maupun UMKM.	a. Dari aspek akses : Belum terbukanya akses perempuan dan laki-laki dalam melakukan kegiatan pelatihan tersebut. b. Dari aspek partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat tinggi peminat dalam melakukan kegiatan pelatihan tersebut. c. Dari aspek control : Tingginya peminat perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap apakah kegiatan itu berjalan dengan baik menjadi sangat terbuka untuk perempuan. d. Dari aspek manfaat : Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti pelatihan menjahit, pelatihan membuat aneka kue/roti, pelatihan MUA, pelatihan babershop, pelatihan service HP dan pelatihan menjahit bad cover.						
	4) d. Meskipun tingkat pengangguran di Kota Payakumbuh mengalami penurunan dari 5,16% menjadi 4,84%*, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh akan tetap menjadi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Tingkat pengangguran untuk Tahun 2023 di Kota Payakumbuh berjumlah 3.770 orang. Tingkat pengangguran banyak didominasi oleh laki-laki							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program /Kegiatan/Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi Prioritas/Kegiatan/Indikator	Baseline Data	Target Kinerja/Indikator Gender
	sebanyak 1.696 orang sedangkan perempuan sebanyak 2.074 orang. 5) Menyikapi permasalahan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melakukan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja. 6) Dengan pelatihan ini tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. 7) Untuk Tahun 2024 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja dilaksanakan dengan jumlah peserta 240 orang.							

Payakumbuh, 8 Juli 2024
 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 Kota Payakumbuh



FATMA FATWA, S.Sos. M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670601 198809 2 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara

Telp/Fax. (0752) 7971800 Email : disnakerprin@gmail.com Website :

<https://disnakerin.payakumbuhkota.go.id>

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
GENDER BUDGET STATEMENT

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota
Payakumbuh

TAHUN ANGGARAN : 2025

Program	Perencanaan dan Pembangunan Industri
Kegiatan	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Kode kegiatan	3.31.02.2.01.05 (Sesuai RKA-SKPD)
Analisis Situasi	1. Data Pembuka Wawasan a. Tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan social, mengurangi atau menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran, sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi daerah menghendaki adanya kerjasama diantara pemerintah, sector swasta dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja seluas-luasnya. b. Kota Payakumbuh sebagai salah satu kota berkembang di Propinsi Sumatera Barat yang memiliki berbagai potensi terutama di segi industry dan wisata kuliner. Khusus disektor industry, Kota Payakumbuh memiliki berbagai industry makanan ringan, makanan

	spesifik/rending, industry coklat, perbengkelan alat mesin pertanian, kerajinan yang sudah menembus pasar Nasional. c. Perkembangan industry Tahun 2023 mengalami kenaikan dari 2.000 IKM menjadi 2.454 IKM. Untuk perkembangan penyerapan tenaga kerja Tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 7.549 orang, yang terdiri laki-laki berjumlah 3.441 orang dan perempuan berjumlah 4.108 orang. d. Menyikapi permasalahan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melalui bidang perindustrian melakukan kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dalam bentuk workshop. Tujuan workshop untuk menyajikan produksi oleh IKM pada pengunjung dan mempromosikan produksi dan produk jadi pada pengunjung MPP pada Gallery Kriya. e. Dengan diadakan workshop ini tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. 2. Issu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan ➤ Dari aspek akses : Belum terbukanya akses perempuan dan laki-laki IKM dalam mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri. ➤ Dari aspek partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat tinggi peminat dalam mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri. ➤ Dari aspek control : Tingginya peminat perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap apakah kegiatan itu berjalan dengan baik menjadi sangat terbuka untuk perempuan. ➤ Dari aspek manfaat : Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti
--	--

	workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri. b. Penyebab Internal ➤ Masih minimnya pemahaman konsep Gender oleh IKM. ➤ Masih adanya pembatasan antara laki dan perempuan untuk ikut kegiatan workshop/pembinaan kepada IKM. ➤ Lebih terbukanya kapasitas dan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan workshop/pembinaan kepada IKM. ➤ Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti workshop/pembinaan kepada IKM. c. Penyebab Eksternal ➤ Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender bahwa gender adalah mendahulukan perempuan. ➤ Adanya budaya patriarki masih mengutamakan kaum pria dalam hal hal yang seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll. ➤ Adanya wacana di masyarakat kalau pengrajin laki-laki tidak lazim.		
Rencana Tindak	Kegiatan	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
		Tujuan	1) Untuk menyajikan produksi oleh IKM pada pengunjung. 2) Mempromosikan produksi dan produk jadi pada pengunjung MPP.
		Aktivitas 1	Pelaksanaan workshop/pelatihan keterkaitan produksi industri bagi IKM yaitu : pelatihan batik, pelatihan bengkel, pelatihan merajut dan

			pelatihan ATBM. 1 Menentukan dan mengundang peserta workshop/pelatihan keterkaitan produksi industri bagi IKM yaitu : pelatihan batik, pelatihan bengkel, pelatihan merajut dan pelatihan ATBM 2 Menyelenggarakan workshop/pelatihan keterkaitan produksi industri bagi IKM yaitu : pelatihan batik, pelatihan bengkel, pelatihan merajut dan pelatihan ATBM 3 Membuat laporan kegiatan Input : 1) IKM Kota Payakumbuh. 2) IKM peserta workshop/IKM yang mengikuti pelatihan keterkaitan produksi industri hulu ke hilir. 3) Narasumber dari Propinsi dan Kota Payakumbuh. 4) Sarana prasarana : Peralatan untuk workshop dan bahan percontohan. Output : Terlaksananya kegiatan workshop/pelatihan kepada IKM Kota Payakumbuh.
Sumber Dana	Rp. 199.186.400,-		
Outcomes	Pelaksanaan workshop/pelatihan keterkaitan produksi industri bagi IKM Rumusan Kinerja : 1) Meningkatnya dan berkembangnya kemampuan IKM dalam diversifikasi produk sesuai selera pasar dan		

	mempromosikan produk hasil diversifikasi produk yang dihasilkan IKM. Indikator Kinerja : 1) Jumlah peserta mengikuti workshop/pelatihan keterkaitan produksi industri sebanyak 60 orang. 2) Tersedianya keterampilan IKM yang menerapkan teknologi tepat guna, sehingga produk yang dihasilkan IKM sesuai selera pasar.
--	---

Payakumbuh, 8 Juli 2024
 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 Kota Payakumbuh



FENIDA FATWA, S.Sos,M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670601 198809 2 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara
Telp/Fax. (0752) 7971800 Email : disnakerprin@gmail.com Website : <https://disnakerin.payakumbuhkota.go.id>

GENDER ANALYSIS PATHWAY DAN POLICY OUTLOOK FOR PLAN OF ACTION (GAP)

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program/Kegiatan/Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi Prioritas/Kegiatan/Indikator	Baseline Data	Target Kinerja/Indikator Gender
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1) Tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan social, mengurangi atau menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran, sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi daerah menghendaki adanya kerjasama diantara pemerintah, sector swasta dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja seluas-luasnya.	Untuk Tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Workshop/pelatihan bagi 15 IKM sandang dan kerajinan yang dilaksanakan dengan 1 workshop/pelatihan yaitu : Workshop/pelatihan membuat	a) Masih minimnya pemahaman konsep Gender oleh IKM. b) Masih adanya pembatasan antara laki dan perempuan untuk ikut kegiatan workshop/pembinaan kepada IKM. c) Lebih terbukanya kapasitas dan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan workshop/pembinaan kepada IKM. d) Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti workshop/pembinaan kepada IKM.	a) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender bahwa gender adalah mendahulukan perempuan. b) Adanya budaya patriarki masih mengutamakan kaum pria dalam hal hal yang seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll. c) Adanya wacana di masyarakat kalau pengrajin laki-laki tidak lazim.	1) Untuk menyajikan produksi oleh IKM pada pengunjung. 2) Mempromosikan produksi dan produk jadi pada pengunjung MPP.	Pelaksanaan workshop/pelatihan keterkaitan produksi industri bagi IKM yaitu : pelatihan batik, pelatihan bengkel, pelatihan merajut dan pelatihan ATBM 1) Menentukan dan mengundang peserta workshop/pelatihan keterkaitan produksi industri bagi IKM yaitu : pelatihan batik, pelatihan bengkel, pelatihan merajut dan pelatihan ATBM 2) Menyelenggarakan workshop/pelatihan keterkaitan produksi industri bagi IKM yaitu : pelatihan batik, pelatihan bengkel, pelatihan merajut dan pelatihan ATBM 3) Membuat laporan kegiatan	Input : 1) IKM Kota Payakumbuh. 2) IKM peserta workshop/IKM yang mengikuti pembinaan keterkaitan produksi industri hulu ke hilir. 3) Narasumber dari Propinsi dan Kota Payakumbuh. 4) Sarana prasarana : Peralatan untuk workshop dan bahan percontohan. Output : Terlaksananya kegiatan workshop/pembinaan kepada IKM Kota Payakumbuh.	Rumusan Kinerja : 1) Meningkatnya dan berkembangnya kemampuan IKM dalam diversifikasi produk sesuai selera pasar dan mempromosikan produk hasil diversifikasi produk yang dihasilkan IKM. Indikator Kinerja : 1) Jumlah peserta mengikuti workshop/pelatihan keterkaitan produksi industri sebanyak 60 orang 2) Tersedianya keterampilan IKM yang menerapkan teknologi tepat guna, sehingga produk yang dihasilkan IKM sesuai selera pasar
Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2) Kota Payakumbuh sebagai salah satu kota berkembang di Propinsi Sumatera Barat yang memiliki berbagai potensi terutama di segi industri dan wisata kuliner. Khusus disektor industri, Kota Payakumbuh memiliki berbagai industri makanan ringan, makanan spesifik/rending, industri coklat, perbengkelan alat mesin pertanian, kerajinan yang sudah menembus pasar Nasional.	Dengan keterlibatan mayoritas perempuan pada kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, maka menimbulkan beberapa permasalahan kesenjangan sbb:						

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/Program /Kegiatan/Tujuan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi Prioritas/Kegiatan/Indikator	Baseline Data	Target Kinerja/Indikator Gender
Tujuan * Untuk Menyajikan Produksi oleh IKM pada pengunjung * Mempromosikan Produksi dan Produk Jadi pada pengunjung MPP pada Gallery Kriya	3) Perkembangan industry Tahun 2021 mengalami kenaikan dari 1.928 IKM menjadi 2.000 IKM. Untuk perkembangan penyerapan tenaga kerja Tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 6.485 orang, yang terdiri laki-laki berjumlah 2.647 orang dan perempuan berjumlah 2.870 orang. 4) Untuk sector kerajinan khususnya lebih mayoritas perempuan, namun pengrajin laki-laki hanya ada beberapa orang. 5) Menyikapi permasalahan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh melalui bidang perindustrian melakukan kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dalam bentuk workshop. Tujuan workshop untuk menyajikan produksi oleh IKM pada pengunjung dan mempromosikan produksi dan produk jadi pada pengunjung MPP pada Gallery Kriya. 6) Dengan diadakan workshop ini tidak membedakan laki-laki maupun perempuan.	a. Dari aspek akses : Belum terbukanya akses perempuan dan laki-laki IKM dalam mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri. b. Dari aspek partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat tinggi peminat dalam mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri. c. Dari aspek control : Tingginya peminat perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap apakah kegiatan itu berjalan dengan baik menjadi sangat terbuka untuk perempuan. d. Dari aspek manfaat : Masih kurangnya peminat laki-laki dibandingkan perempuan untuk mengikuti workshop/pembinaan keterkaitan produksi industri.						

Payakumbuh, 8 Juli 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh



FATMA FATWA, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670601 198809 2 001

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,77%
2. Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,30%
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A

Payakumbuh, Agustus 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh



NUNIDA FATWA, S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670601 198809 2 001

